



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1961, 2017

KEMENKEU. Instansi Vertikal Ditjen Pajak. ORTA.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 210/PMK.01/2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor pajak, serta meningkatkan kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara;
- c. bahwa penyempurnaan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/444/M.KT.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

4. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

BAB I  
KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bagian Kesatu  
Kedudukan Kantor Wilayah

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua  
Jenis, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi  
Kantor Wilayah

Pasal 2

Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus; dan
- b. Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus.

Pasal 3

Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 1

Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan  
Kantor Wilayah Jakarta Khusus

## Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi:
- a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
  - b. koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
  - c. koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
  - d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
  - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, penilaian, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
  - f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
  - g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
  - h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
  - i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;
  - j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
- dan



- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

#### Pasal 5

Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;
- c. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
- d. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
- e. Bidang Keberatan dan Banding; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan advokasi;

- d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas;
- e. pengelolaan kinerja;
- f. pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan; dan
- k. pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kantor Wilayah.

#### Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, melakukan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melaksanakan administrasi Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi penanganan advokasi, melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah, laporan akuntabilitas, dan pengelolaan kinerja organisasi, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- (4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara Kantor Wilayah, melakukan pelaksanaan bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah, dan melakukan pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kantor Wilayah.

#### Pasal 10

- (1) Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, melaksanakan bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, dan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana diatur pada ayat (1), Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh

bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, serta melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi perpajakan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemberian bimbingan pengawasan;
  - b. pemberian bimbingan penggalan potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
  - c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - d. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak;
  - e. pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan;
  - f. pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan;
  - g. pemberian dukungan teknis komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, serta pembuatan *back-up* data;
  - h. pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan;
  - i. analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus;
  - j. pengelolaan risiko Kantor Wilayah; dan
  - k. bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur pada ayat (1), Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan

pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, pemutakhiran basis data pajak, penilaian dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, serta pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak.

#### Pasal 12

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Potensi;
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan, melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan, serta melakukan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.
- (2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan, dan bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- (3) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan dukungan teknis komputer, pemeliharaan

dan perbaikan jaringan komputer, pembuatan *back-up* data, serta pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan.

- (4) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bimbingan Pengawasan pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya serta bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak.

#### Pasal 14

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan peninjauan sejawat (*peer review*) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak;
- b. pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- c. pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- d. pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak;
- f. pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan;
- h. pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. peninjauan sejawat (*peer review*) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; dan
- j. penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak.

#### Pasal 16

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
- b. Seksi Bimbingan Penagihan;
- c. Seksi Intelijen; dan
- d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan pajak, melakukan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melakukan pemberian bimbingan pemeriksaan pajak, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan pajak, melakukan peninjauan

sejawat (*peer review*) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, dan melakukan penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak.

- (2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan administrasi penagihan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan memberikan bantuan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, serta melakukan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah.
- (4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

#### Pasal 18

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak;



- b. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak;
- d. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dokumen perpajakan;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan pajak;
- f. pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- g. pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya;
- h. pelaksanaan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- i. pelaksanaan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah; dan
- j. pelaksanaan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat.

#### Pasal 20

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
- b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dokumen perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah, melakukan penyuluhan dan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah, melakukan pengelolaan perpustakaan, serta melakukan pemutakhiran panduan informasi perpajakan bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, melakukan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, serta melaksanakan pelayanan yang menjadi wewenang Kantor Wilayah.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerja sama di bidang perpajakan, melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan bagi pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak melalui sarana publikasi lainnya, dan melakukan urusan hubungan masyarakat, penyampaian informasi serta peningkatan citra Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Keberatan dan Banding mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana diatur pada ayat (1), Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal

perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemberian bimbingan dan pemantauan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
  - b. pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah;
  - c. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan keberatan;
  - d. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi;
  - e. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
  - f. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar;
  - g. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
  - h. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan;
  - i. penyelesaian proses banding dan proses gugatan; dan
  - j. penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keberatan dan Banding pada

Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

#### Pasal 24

Bidang Keberatan dan Banding terdiri atas:

- a. Seksi Keberatan dan Banding I;
- b. Seksi Keberatan dan Banding II;
- c. Seksi Keberatan dan Banding III; dan
- d. Seksi Keberatan dan Banding IV.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Keberatan dan Banding I, Seksi Keberatan dan Banding II, Seksi Keberatan dan Banding III, dan Seksi Keberatan dan Banding IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak, penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan, serta melakukan penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keberatan dan Banding I, Seksi Keberatan dan Banding II, Seksi Keberatan dan Banding III, dan Seksi Keberatan dan Banding IV pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus juga mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan

atau pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

Paragraf 2

Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
- f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
- g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
- h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
- i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan

- j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

#### Pasal 27

Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;
- c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian;
- d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
- e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
- f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 28

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan advokasi;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas;
- e. pengelolaan kinerja;
- f. pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis;

- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pemberian bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan; dan
- k. pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kantor Wilayah.

#### Pasal 30

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

#### Pasal 31

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, melakukan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melaksanakan administrasi Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi penanganan advokasi, melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah, laporan akuntabilitas, dan pengelolaan kinerja organisasi, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- (4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara Kantor Wilayah, melakukan pelaksanaan bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah, dan melakukan pelaksanaan urusan protokoler Kantor Wilayah.

#### Pasal 32

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, dan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.

#### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan pengawasan;
- b. pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
- d. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak;
- e. pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan;
- f. pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan;
- g. pemberian dukungan teknis komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, serta pembuatan *back-up* data;



- h. pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan;
- i. pengelolaan risiko Kantor Wilayah; dan
- j. pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

#### Pasal 34

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Potensi;
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

#### Pasal 35

- (1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan, melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan, melakukan pengusulan penataan wilayah kerja unit vertikal berdasarkan perubahan wilayah administrasi pemerintahan, serta melakukan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.
- (2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan pengawasan dan penggalan potensi perpajakan, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan, serta melakukan bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- (3) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, melakukan pembuatan *back-up* data, serta melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan.

## Pasal 36

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi dan pengawasan Wajib Pajak baru, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian pajak, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru.

## Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- b. pemberian bimbingan pengamatan potensi perpajakan;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak;
- d. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak;
- e. pelaksanaan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar;

- f. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan dukungan pemutakhiran basis data pajak;
- g. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian dan pengenaan untuk tujuan perpajakan; dan
- h. pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru.

#### Pasal 38

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Pendaftaran;
- b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan
- c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.

#### Pasal 39

- (1) Seksi Bimbingan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, serta penyelesaian urusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
- (2) Seksi Bimbingan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak, dan melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak,

serta pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru.

- (3) Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian Objek Pajak, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan pemutakhiran basis data pajak, dan melakukan proses penyelesaian klasifikasi nilai jual objek pajak serta menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek pajak antar wilayah.

#### Pasal 40

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (*peer review*), memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak;
- b. pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- c. pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- d. pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak;
- f. pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan;
- h. pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. peninjauan sejawat (*peer review*) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; dan
- j. penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak.

#### Pasal 42

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
- b. Seksi Bimbingan Penagihan;
- c. Seksi Intelijen; dan
- d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

#### Pasal 43

- (1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan

pajak, melakukan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor, melakukan pemberian bimbingan pemeriksaan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, melakukan peninjauan sejawat (*peer review*) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, dan melakukan penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak.

- (2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan administrasi penagihan, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan memberikan bantuan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, serta melakukan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah.
- (4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

#### Pasal 44

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan;
- b. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dokumen perpajakan;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan pajak;
- e. pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- f. pemeliharaan dan pemutakhiran website dan panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya;
- g. pelaksanaan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- h. pelaksanaan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah; dan
- i. pelaksanaan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat.

#### Pasal 46

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
- b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 47

- (1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak, melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dokumen perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah, melakukan penyuluhan dan pengelolaan dokumen perpajakan di

Kantor Wilayah, melakukan pengelolaan perpustakaan, serta melakukan pemutakhiran panduan informasi perpajakan bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak, melakukan pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, melakukan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, serta melaksanakan pelayanan yang menjadi wewenang Kantor Wilayah.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerja sama di bidang perpajakan, melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan bagi pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak melalui sarana publikasi lainnya, dan melakukan urusan hubungan masyarakat, penyampaian informasi serta peningkatan citra Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 48

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/ pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan.



#### Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
- b. pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah;
- c. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan keberatan;
- d. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi;
- e. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- f. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar;
- g. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
- h. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan;
- i. pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
- j. penyelesaian proses banding dan proses gugatan; dan
- k. penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan.

#### Pasal 50

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan terdiri atas:

- a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I;
- b. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II;
- c. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III; dan

d. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV.

#### Pasal 51

Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III, dan Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak, pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan, serta melakukan penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan.

### BAB II

#### KANTOR PELAYANAN PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak

#### Pasal 52

- (1) Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) KPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua  
Jenis, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 53

Jenis KPP terdiri atas:

- a. KPP Wajib Pajak Besar;
- b. KPP Madya; dan
- c. KPP Pratama.

Paragraf 1

KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya

Pasal 54

- (1) KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Minyak dan Gas Bumi juga melaksanakan tugas pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan pajak;
  - b. penyuluhan pajak;
  - c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
  - e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
  - f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
  - g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
  - h. pemeriksaan pajak;
  - i. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
  - j. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
  - k. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
  - l. pembetulan ketetapan pajak;
  - m. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
  - n. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
  - o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
  - p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
  - q. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
  - r. pelaksanaan administrasi kantor.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Minyak dan Gas Bumi juga menyelenggarakan fungsi pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, pengelolaan basis data dan sistem informasi, serta penatausahaan dan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.
- (3) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Badan dan Orang Asing menyelenggarakan fungsi pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta

pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

#### Pasal 56

KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan;
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 57

- (1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan

penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, melakukan penyuluhan perpajakan, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- (4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.
- (5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- (6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat.
- (7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada

Wajib Pajak, melakukan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

- (8) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.
- (9) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.
- (10) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV pada KPP Minyak dan Gas Bumi juga mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.
- (11) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi Pemeriksaan pada KPP Badan dan Orang Asing juga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Paragraf 2  
KPP Pratama

Pasal 58

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pajak;
- b. penyuluhan pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- i. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- k. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- l. pemeriksaan pajak;
- m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;



- n. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- o. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- p. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- q. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- r. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- s. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- t. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- u. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- v. pelaksanaan administrasi kantor.

#### Pasal 60

KPP Pratama terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan;
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 61

- (1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan

melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.
- (5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- (6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor

Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, melakukan penyuluhan pajak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, serta melakukan kegiatan penilaian.

- (7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

BAB III  
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN  
KONSULTASI PERPAJAKAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
- (2) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 63

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Pasal 64

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pajak;
- b. penyuluhan pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan;

- e. pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan;
- f. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu;
- g. pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama; dan
- h. pelaksanaan administrasi kantor.

#### Pasal 65

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan terdiri atas:

- a. Petugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 66

Petugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan konsultasi teknis perpajakan, melakukan pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu, dan melakukan administrasi kantor, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 67

- (1) Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 68

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Pajak harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

## Pasal 70

Setiap pimpinan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 71

Direktorat Jenderal Pajak wajib menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 72

Setiap unsur di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Keuangan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 73

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 74

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 75

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## Pasal 78

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 28, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 61, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala KPP.

## Pasal 79

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah dan KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 28, Pasal 57, dan Pasal 61 berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor/wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Unit organisasi/pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

## Pasal 80

- (1) Kepala Bagian dan para Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, serta Kepala KPP menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya.



- (2) Kepala Bagian Umum menampung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun laporan berkala.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar, Kepala KPP Madya, atau Kepala KPP Pratama atasannya.
- (4) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Pratama atasannya.
- (5) Kepala Subbagian Umum pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama, menampung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dan menyusun laporan berkala.
- (6) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat atasannya.

## BAB VI

### JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 81

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini terdapat:
  - a. 34 (tiga puluh empat) Kantor Wilayah;
  - b. 4 (empat) KPP Wajib Pajak Besar;
  - c. 29 (dua puluh sembilan) KPP Madya;
  - d. 319 (tiga ratus sembilan belas) KPP Pratama; dan
  - e. 204 (dua ratus empat) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja dari:
  - a. Kantor Wilayah tercantum dalam Lampiran I;
  - b. KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama tercantum dalam Lampiran II; dan
  - c. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan tercantum dalam Lampiran III,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Bagan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal terjadi pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

## BAB VII ESELONISASI

### Pasal 82

- (1) Kepala Kantor Wilayah merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala KPP Wajib Pajak Besar, Kepala KPP Madya, dan Kepala KPP Pratama merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 83

Kantor Wilayah melakukan fungsi pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak, dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 84

- (1) Kantor Wilayah, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama melakukan fungsi pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan/atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (2) Kantor Wilayah, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP Pratama melakukan fungsi pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan melakukan fungsi pemeriksaan pajak dalam rangka pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan yang dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (4) Penilaian angka kredit atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Seksi di Bidang Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan Seksi di Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan pada Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus membawahi para Penelaah Keberatan.
- (6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

pada KPP Pratama membawahi para *Account Representative*.

- (7) Penentuan jumlah Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 85

- (1) Pembagian sektor Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP Wajib Pajak Besar ditetapkan sebagai berikut:
  - a. KPP Wajib Pajak Besar Satu mengadministrasikan Wajib Pajak dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan;
  - b. KPP Wajib Pajak Besar Dua mengadministrasikan Wajib Pajak Besar dari sektor industri, perdagangan, dan jasa;
  - c. KPP Wajib Pajak Besar Tiga mengadministrasikan Wajib Pajak dari Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara sektor industri dan perdagangan; dan
  - d. KPP Wajib Pajak Besar Empat mengadministrasikan Wajib Pajak dari Perusahaan Negara/ Badan Usaha Milik Negara sektor jasa dan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- (2) Pembagian sektor Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan beban kerja yang signifikan.
- (3) Perubahan atas pembagian sektor Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Penentuan kriteria dan/atau pemilihan Wajib Pajak yang diadministrasikan oleh KPP Wajib Pajak Besar ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Pembagian sektor, penentuan kriteria, dan/atau pemilihan Wajib Pajak yang diadministrasikan oleh KPP Madya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (6) Pembagian sektor Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) wajib disampaikan kepada Menteri

dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 86

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 87

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja eselon III ke bawah pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran, ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Salinan penetapan rincian tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 88

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan

dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 89

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 90

- (1) Selama organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku, paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan secara efektif atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilakukan sebelum waktu pelaksanaan secara efektif yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1894), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

| NO. | N A M A                              | LOKASI     | WILAYAH KERJA                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |            | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.  | KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR | Jakarta    | Seluruh Indonesia                               | 1. KPP Wajib Pajak Besar Satu<br>2. KPP Wajib Pajak Besar Dua<br>3. KPP Wajib Pajak Besar Tiga<br>4. KPP Wajib Pajak Besar Empat                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS    | Jakarta    | a. Provinsi DKI Jakarta<br>b. Seluruh Indonesia | 1. KPP Penanaman Modal Asing Satu<br>2. KPP Penanaman Modal Asing Dua<br>3. KPP Penanaman Modal Asing Tiga<br>4. KPP Penanaman Modal Asing Empat<br>5. KPP Penanaman Modal Asing Lima<br>6. KPP Penanaman Modal Asing Enam<br>7. KPP Badan dan Orang Asing<br>8. KPP Minyak dan Gas Bumi<br>9. KPP Perusahaan Masuk Bursa |
| 3.  | KANTOR WILAYAH DJP ACEH              | Banda Aceh | Provinsi Aceh                                   | 1. KPP Pratama Banda Aceh<br>2. KPP Pratama Aceh Besar<br>3. KPP Pratama Lhokseumawe<br>4. KPP Pratama Meulaboh                                                                                                                                                                                                           |

| NO. | N A M A                              | LOKASI           | WILAYAH KERJA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |                  | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                      |                  |                                  | 5. KPP Pratama Bireuen<br>6. KPP Pratama Langsa<br>7. KPP Pratama Tapak Tuan<br>8. KPP Pratama Subulussalam<br>9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sigli<br>10. KP2KP Sabang<br>11. KP2KP Lhoksukon<br>12. KP2KP Calang<br>13. KP2KP Suka Makmur<br>14. KP2KP Takengon<br>15. KP2KP Rimba Raya<br>16. KP2KP Karang Baru<br>17. KP2KP Blangkejeren<br>18. KP2KP Blangpidie<br>19. KP2KP Sinabang<br>20. KP2KP Aceh Singkil<br>21. KP2KP Kutacane |
| 4.  | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I  | Medan            | Sebagian Provinsi Sumatera Utara | 1. KPP Madya Medan<br>2. KPP Pratama Medan Barat<br>3. KPP Pratama Medan Belawan<br>4. KPP Pratama Medan Timur<br>5. KPP Pratama Medan Polonia<br>6. KPP Pratama Medan Kota<br>7. KPP Pratama Medan Petisah<br>8. KPP Pratama Binjai<br>9. KPP Pratama Lubuk Pakam                                                                                                                                                                                                             |
| 5.  | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II | Pematang Siantar | Sebagian Provinsi Sumatera Utara | 1. KPP Pratama Tebing Tinggi<br>2. KPP Pratama Kisaran<br>3. KPP Pratama Rantau Prapat<br>4. KPP Pratama Pematang Siantar<br>5. KPP Pratama Padang Sidempuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| NO. | N A M A                           | LOKASI    | WILAYAH KERJA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                   |           |                                  | 6. KPP Pratama Sibolga<br>7. KPP Pratama Balige<br>8. KPP Pratama Kabanjahe<br>9. KP2KP Tanjung Balai<br>10. KP2KP Kualuh Hulu<br>11. KP2KP Kota Pinang<br>12. KP2KP Perdagangan<br>13. KP2KP Panyabungan<br>14. KP2KP Sibuhuan<br>15. KP2KP Pandan<br>16. KP2KP Gunung Sitoli<br>17. KP2KP Dolok Sanggul<br>18. KP2KP Tarutung<br>19. KP2KP Sidikalang                                                                               |
| 6.  | KANTOR WILAYAH DJP RIAU           | Pekanbaru | Provinsi Riau                    | 1. KPP Madya Pekanbaru<br>2. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan<br>3. KPP Pratama Pekanbaru Tampan<br>4. KPP Pratama Dumai<br>5. KPP Pratama Rengat<br>6. KPP Pratama Bengkalis<br>7. KPP Pratama Bangkinang<br>8. KPP Pratama Pangkalan Kerinci<br>9. KP2KP Bagansiapiapi<br>10. KP2KP Tembilahan<br>11. KP2KP Teluk Kuantan<br>12. KP2KP Duri<br>13. KP2KP Selat Panjang<br>14. KP2KP Pasir Pangarayan<br>15. KP2KP Siak Sri Indrapura |
| 7.  | KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU | Batam     | Provinsi Kepulauan Riau          | 1. KPP Madya Batam<br>2. KPP Pratama Tanjung Pinang<br>3. KPP Pratama Batam Utara<br>4. KPP Pratama Batam Selatan<br>5. KPP Pratama Tanjung Balai Karimun<br>6. KPP Pratama Bintan                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NO. | N A M A                                     | LOKASI    | WILAYAH KERJA                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                      | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                             |           |                                                                       | 7. KP2KP Ranai<br>8. KP2KP Tanjung Batu<br>9. KP2KP Dabo Singkep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI | Padang    | 1. Provinsi Sumatera Barat<br>2. Provinsi Jambi                       | 1. KPP Pratama Padang Satu<br>2. KPP Pratama Padang Dua<br>3. KPP Pratama Bukittinggi<br>4. KPP Pratama Solok<br>5. KPP Pratama Payakumbuh<br>6. KPP Pratama Jambi Telanaipura<br>7. KPP Pratama Jambi Pelayangan<br>8. KPP Pratama Muara Bungo<br>9. KPP Pratama Bangko<br>10. KPP Pratama Kuala Tungkal<br>11. KP2KP Tua Pejat<br>12. KP2KP Painan<br>13. KP2KP Pariaman<br>14. KP2KP Lubuk Basung<br>15. KP2KP Lubuk Sikaping<br>16. KP2KP Padang Panjang<br>17. KP2KP Simpang Empat<br>18. KP2KP Kotabaru<br>19. KP2KP Muaro Sijunjung<br>20. KP2KP Padang Aro<br>21. KP2KP Sawahlunto<br>22. KP2KP Batu Sangkar<br>23. KP2KP Muara Bulian<br>24. KP2KP Sengeti<br>25. KP2KP Rimbo Bujang<br>26. KP2KP Muara Tebo<br>27. KP2KP Sungai Penuh<br>28. KP2KP Sarolangun<br>29. KP2KP Muara Sabak |
| 9.  | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN     | Palembang | a. Provinsi Sumatera Selatan<br>b. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1. KPP Madya Palembang<br>2. KPP Pratama Palembang Ilir Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NO. | N A M A                                 | LOKASI         | WILAYAH KERJA                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN            | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG               |                |                                             | 3. KPP Pratama Palembang Ilir Barat<br>4. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu<br>5. KPP Pratama Baturaja<br>6. KPP Pratama Lubuk Linggau<br>7. KPP Pratama Pangkal Pinang<br>8. KPP Pratama Tanjung Pandan<br>9. KPP Pratama Lahat<br>10. KPP Pratama Kayu Agung<br>11. KPP Pratama Prabumulih<br>12. KPP Pratama Sekayu<br>13. KPP Pratama Bangka<br>14. KP2KP Muaradua<br>15. KP2KP Martapura<br>16. KP2KP Tugumulyo<br>17. KP2KP Manggar<br>18. KP2KP Pagar Alam<br>19. KP2KP Tebingtinggi<br>20. KP2KP Indralaya<br>21. KP2KP Muara Enim<br>22. KP2KP Pangkalan Balai<br>23. KP2KP Muntok<br>24. KP2KP Sungai Liat<br>25. KP2KP Toboali<br>26. KP2KP Koba |
| 10. | KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG | Bandar Lampung | a. Provinsi Bengkulu<br>b. Provinsi Lampung | 1. KPP Pratama Bengkulu<br>2. KPP Pratama Metro<br>3. KPP Pratama Tanjung Karang<br>4. KPP Pratama Teluk Betung<br>5. KPP Pratama Kedaton<br>6. KPP Pratama Natar<br>7. KPP Pratama Kotabumi<br>8. KPP Pratama Curup<br>9. KPP Pratama Argamakmur<br>10. KP2KP Mauna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO. | N A M A                          | LOKASI  | WILAYAH KERJA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |         | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                  |         |                                  | 11. KP2KP Bintuhan<br>12. KP2KP Bandarjaya<br>13. KP2KP Sukadana<br>14. KP2KP Kalianda<br>15. KP2KP Pringsewu<br>16. KP2KP Liwa<br>17. KP2KP Menggala<br>18. KP2KP Baradatu<br>19. KP2KP Kepahiang<br>20. KP2KP Mukomuko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT | Jakarta | Kota Jakarta Pusat               | 1. KPP Madya Jakarta Pusat<br>2. KPP Pratama Jakarta Menteng Satu<br>3. KPP Pratama Jakarta Menteng Dua<br>4. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga<br>5. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu<br>6. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua<br>7. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga<br>8. KPP Pratama Jakarta Senen<br>9. KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih<br>10. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu<br>11. KPP Pratama Jakarta Gambir Dua<br>12. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga<br>13. KPP Pratama Jakarta Gambir Empat<br>14. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu<br>15. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua<br>16. KPP Pratama Jakarta Kemayoran |
| 12. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT | Jakarta | Kota Jakarta Barat               | 1. KPP Madya Jakarta Barat<br>2. KPP Pratama Jakarta Palmerah<br>3. KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO. | N A M A                               | LOKASI  | WILAYAH KERJA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       |         | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                       |         |                                  | 4. KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua<br>5. KPP Pratama Jakarta Tambora<br>6. KPP Pratama Jakarta Cengkareng<br>7. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu<br>8. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua<br>9. KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan<br>10. KPP Pratama Jakarta Kalideres<br>11. KPP Pratama Jakarta Kembangan |
| 13. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I  | Jakarta | Sebagian Kota Jakarta Selatan    | 1. KPP Madya Jakarta Selatan I<br>2. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu<br>3. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua<br>4. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga<br>5. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat<br>6. KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan<br>7. KPP Pratama Jakarta Tebet<br>8. KPP Pratama Jakarta Pancoran       |
| 14. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II | Jakarta | Sebagian Kota Jakarta Selatan    | 1. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu<br>2. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua<br>3. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga<br>4. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat<br>5. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama<br>6. KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan<br>7. KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu            |

| NO. | N A M A                          | LOKASI  | WILAYAH KERJA                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |         | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                       | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                  |         |                                                        | 8. KPP Pratama Jakarta Jagakarsa<br>9. KPP Pratama Jakarta Cilandak                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR | Jakarta | Kota Jakarta Timur                                     | 1. KPP Madya Jakarta Timur<br>2. KPP Pratama Jakarta Matraman<br>3. KPP Pratama Jakarta Jatinegara<br>4. KPP Pratama Jakarta Pulogadung<br>5. KPP Pratama Jakarta Cakung Satu<br>6. KPP Pratama Jakarta Cakung Dua<br>7. KPP Pratama Jakarta Kramat Jati<br>8. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit<br>9. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo |
| 16. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA | Jakarta | 1. Kota Jakarta Utara<br>2. Kabupaten Kepulauan Seribu | 1. KPP Madya Jakarta Utara<br>2. KPP Pratama Jakarta Penjarangan<br>3. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok<br>4. KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading<br>5. KPP Pratama Jakarta Pademangan<br>6. KPP Pratama Jakarta Koja<br>7. KPP Pratama Jakarta Pluit<br>8. KPP Pratama Jakarta Sunter<br>9. KP2KP Kepulauan Seribu                  |
| 17. | KANTOR WILAYAH DJP BANTEN        | Serang  | Provinsi Banten                                        | 1. KPP Madya Tangerang<br>2. KPP Pratama Serang Barat<br>3. KPP Pratama Serang Timur<br>4. KPP Pratama Tangerang Barat                                                                                                                                                                                                              |



| NO. | N A M A                          | LOKASI  | WILAYAH KERJA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |         | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                  |         |                                  | 5. KPP Pratama Tangerang Timur<br>6. KPP Pratama Serpong<br>7. KPP Pratama Pondok Aren<br>8. KPP Pratama Cilegon<br>9. KPP Pratama Kosambi<br>10. KPP Pratama Pandeglang<br>11. KPP Pratama Tigaraksa<br>12. KPP Pratama Cikupa<br>13. KP2KP Rangkas Bitung                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I  | Bandung | Sebagian Provinsi Jawa Barat     | 1. KPP Madya Bandung<br>2. KPP Pratama Sukabumi<br>3. KPP Pratama Cianjur<br>4. KPP Pratama Purwakarta<br>5. KPP Pratama Cimahi<br>6. KPP Pratama Bandung Tegallega<br>7. KPP Pratama Bandung Cibeunying<br>8. KPP Pratama Bandung Karees<br>9. KPP Pratama Bandung Bojonagara<br>10. KPP Pratama Bandung Cicadas<br>11. KPP Pratama Tasikmalaya<br>12. KPP Pratama Ciamis<br>13. KPP Pratama Garut<br>14. KPP Pratama Majalaya<br>15. KPP Pratama Soreang<br>16. KPP Pratama Sumedang<br>17. KP2KP Pelabuhan Ratu<br>18. KP2KP Banjar |
| 19. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II | Bekasi  | Sebagian Provinsi Jawa Barat     | 1. KPP Madya Bekasi<br>2. KPP Pratama Cikarang Selatan<br>3. KPP Pratama Cikarang Utara<br>4. KPP Pratama Cibitung<br>5. KPP Pratama Karawang Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NO. | N A M A                           | LOKASI   | WILAYAH KERJA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |          | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                   |          |                                  | 6. KPP Pratama Karawang Selatan<br>7. KPP Pratama Subang<br>8. KPP Pratama Indramayu<br>9. KPP Pratama Cirebon Satu<br>10. KPP Pratama Cirebon Dua<br>11. KPP Pratama Kuningan<br>12. KP2KP Majalengka                                                                                                                                                             |
| 20. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III | Bogor    | Sebagian Provinsi Jawa Barat     | 1. KPP Madya Bogor<br>2. KPP Pratama Pondok Gede<br>3. KPP Pratama Bekasi Barat<br>4. KPP Pratama Bekasi Selatan<br>5. KPP Pratama Bekasi Utara<br>6. KPP Pratama Depok Sawangan<br>7. KPP Pratama Depok Cimanggis<br>8. KPP Pratama Cibinong<br>9. KPP Pratama Ciawi<br>10. KPP Pratama Cileungsi<br>11. KPP Pratama Bogor                                        |
| 21. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I  | Semarang | Sebagian Provinsi Jawa Tengah    | 1. KPP Madya Semarang<br>2. KPP Pratama Tegal<br>3. KPP Pratama Pekalongan<br>4. KPP Pratama Semarang Barat<br>5. KPP Pratama Semarang Timur<br>6. KPP Pratama Semarang Selatan<br>7. KPP Pratama Semarang Tengah Satu<br>8. KPP Pratama Semarang Tengah Dua<br>9. KPP Pratama Salatiga<br>10. KPP Pratama Kudus<br>11. KPP Pratama Pati<br>12. KPP Pratama Batang |

| NO. | N A M A                                       | LOKASI     | WILAYAH KERJA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                               |            | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                               |            |                                  | 13. KPP Pratama Blora<br>14. KPP Pratama Demak<br>15. KPP Pratama Jepara<br>16. KPP Pratama Semarang Candisari<br>17. KPP Pratama Semarang Gayamsari<br>18. KP2KP Bumiayu<br>19. KP2KP Ungaran<br>20. KP2KP Rembang<br>21. KP2KP Kendal<br>22. KP2KP Purwodadi                                                                                                                                                                                                                     |
| 22. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II             | Surakarta  | Sebagian Provinsi Jawa Tengah    | 1. KPP Pratama Purwokerto<br>2. KPP Pratama Cilacap<br>3. KPP Pratama Kebumen<br>4. KPP Pratama Magelang<br>5. KPP Pratama Klaten<br>6. KPP Pratama Surakarta<br>7. KPP Pratama Boyolali<br>8. KPP Pratama Karanganyar<br>9. KPP Pratama Purbalingga<br>10. KPP Pratama Purworejo<br>11. KPP Pratama Sukoharjo<br>12. KPP Pratama Temanggung<br>13. KP2KP Majenang<br>14. KP2KP Muntilan<br>15. KP2KP Sragen<br>16. KP2KP Banjarnegara<br>17. KP2KP Wonogiri<br>18. KP2KP Wonosobo |
| 23. | KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Yogyakarta | Provinsi DI Yogyakarta           | 1. KPP Pratama Yogyakarta<br>2. KPP Pratama Bantul<br>3. KPP Pratama Sleman<br>4. KPP Pratama Wates<br>5. KPP Pratama Wonosari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24. | KANTOR WILAYAH DJP                            | Surabaya   | Sebagian Provinsi Jawa Timur     | 1. KPP Madya Surabaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO. | N A M A                          | LOKASI   | WILAYAH KERJA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |          | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | JAWA TIMUR I                     |          |                                  | 2. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal<br>3. KPP Pratama Surabaya Krembangan<br>4. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan<br>5. KPP Pratama Surabaya Gubeng<br>6. KPP Pratama Surabaya Tegalsari<br>7. KPP Pratama Surabaya Sawahan<br>8. KPP Pratama Surabaya Wonocolo<br>9. KPP Pratama Surabaya Genteng<br>10. KPP Pratama Surabaya Simokerto<br>11. KPP Pratama Surabaya Rungkut<br>12. KPP Pratama Surabaya Karangpilang<br>13. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo |
| 25. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II | Sidoarjo | Sebagian Provinsi Jawa Timur     | 1. KPP Madya Sidoarjo<br>2. KPP Pratama Bojonegoro<br>3. KPP Pratama Mojokerto<br>4. KPP Pratama Jombang<br>5. KPP Pratama Sidoarjo Barat<br>6. KPP Pratama Sidoarjo Selatan<br>7. KPP Pratama Sidoarjo Utara<br>8. KPP Pratama Pamekasan<br>9. KPP Pratama Gresik Utara<br>10. KPP Pratama Gresik Selatan<br>11. KPP Pratama Madiun<br>12. KPP Pratama Bangkalan                                                                                                |

| NO. | N A M A                             | LOKASI    | WILAYAH KERJA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                     |           |                                  | 13. KPP Pratama Lamongan<br>14. KPP Pratama Ngawi<br>15. KPP Pratama Tuban<br>16. KPP Pratama Ponorogo<br>17. KP2KP Mojokari<br>18. KP2KP Sumenep<br>19. KP2KP Caruban<br>20. KP2KP Sampang<br>21. KP2KP Magetan<br>22. KP2KP Pacitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III   | Malang    | Sebagian Provinsi Jawa Timur     | 1. KPP Madya Malang<br>2. KPP Pratama Kediri<br>3. KPP Pratama Malang Selatan<br>4. KPP Pratama Malang Utara<br>5. KPP Pratama Batu<br>6. KPP Pratama Pasuruan<br>7. KPP Pratama Probolinggo<br>8. KPP Pratama Jember<br>9. KPP Pratama Banyuwangi<br>10. KPP Pratama Tulungagung<br>11. KPP Pratama Blitar<br>12. KPP Pratama Kepanjen<br>13. KPP Pratama Pare<br>14. KPP Pratama Situbondo<br>15. KPP Pratama Singosari<br>16. KP2KP Bangil<br>17. KP2KP Kraksaan<br>18. KP2KP Lumajang<br>19. KP2KP Trenggalek<br>20. KP2KP Wlingi<br>21. KP2KP Nganjuk<br>22. KP2KP Bondowoso |
| 27. | KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT | Pontianak | Provinsi Kalimantan Barat        | 1. KPP Pratama Pontianak Barat<br>2. KPP Pratama Pontianak Timur<br>3. KPP Pratama Singkawang<br>4. KPP Pratama Ketapang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| NO. | N A M A                                          | LOKASI      | WILAYAH KERJA                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |             | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                  |             |                                                                 | 5. KPP Pratama Mempawah<br>6. KPP Pratama Sanggau<br>7. KPP Pratama Sintang<br>8. KP2KP Bengkayang<br>9. KP2KP Sambas<br>10. KP2KP Mempawah<br>11. KP2KP Ngabang<br>12. KP2KP Sekadau<br>13. KP2KP Putussibau<br>14. KP2KP Nangapinoh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28. | KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH | Banjarmasin | 1. Provinsi Kalimantan Selatan<br>2. Provinsi Kalimantan Tengah | 1. KPP Pratama Palangkaraya<br>2. KPP Pratama Sampit<br>3. KPP Pratama Pangkalanbun<br>4. KPP Pratama Muara Teweh<br>5. KPP Pratama Banjarmasin Selatan<br>6. KPP Pratama Banjarmasin Utara<br>7. KPP Pratama Banjarbaru<br>8. KPP Pratama Barabai<br>9. KPP Pratama Batulicin<br>10. KPP Pratama Tanjung<br>11. KP2KP Kuala Kurun<br>12. KP2KP Kuala Kapuas<br>13. KP2KP Pulang Pisau<br>14. KP2KP Kasongan<br>15. KP2KP Kuala Pembuang<br>16. KP2KP Nanga Bulik<br>17. KP2KP Sukamara<br>18. KP2KP Buntok<br>19. KP2KP Tamiang Layang<br>20. KP2KP Puruk Cahu<br>21. KP2KP Marabahan<br>22. KP2KP Pelaihari<br>23. KP2KP Martapura<br>24. KP2KP Rantau<br>25. KP2KP Kandungan<br>26. KP2KP Kotabaru<br>27. KP2KP Paringin<br>28. KP2KP Amuntai |

| NO. | N A M A                                                  | LOKASI     | WILAYAH KERJA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |            | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                            | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. | KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA            | Balikpapan | a. Provinsi Kalimantan Timur<br>b. Provinsi Kalimantan Utara                                | 1. KPP Madya Balikpapan<br>2. KPP Pratama Balikpapan Barat<br>3. KPP Pratama Balikpapan Timur<br>4. KPP Pratama Samarinda Ilir<br>5. KPP Pratama Samarinda Ulu<br>6. KPP Pratama Tarakan<br>7. KPP Pratama Bontang<br>8. KPP Pratama Penajam<br>9. KPP Pratama Tanjung Redeb<br>10. KPP Pratama Tenggarong<br>11. KP2KP Nunukan<br>12. KP2KP Sangatta<br>13. KP2KP Tanah Grogot<br>14. KP2KP Tanjung Selor<br>15. KP2KP Malinau<br>16. KP2KP Sendawar                                                                                 |
| 30. | KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA | Makassar   | 1. Provinsi Sulawesi Selatan<br>2. Provinsi Sulawesi Barat<br>3. Provinsi Sulawesi Tenggara | 1. KPP Madya Makassar<br>2. KPP Pratama Makassar Utara<br>3. KPP Pratama Makassar Barat<br>4. KPP Pratama Makassar Selatan<br>5. KPP Pratama Parepare<br>6. KPP Pratama Palopo<br>7. KPP Pratama Bulukumba<br>8. KPP Pratama Bantaeng<br>9. KPP Pratama Watampone<br>10. KPP Pratama Maros<br>11. KPP Pratama Kendari<br>12. KPP Pratama Majene<br>13. KPP Pratama Mamuju<br>14. KPP Pratama Kolaka<br>15. KPP Pratama Baubau<br>16. KP2KP Enrekang<br>17. KP2KP Pinrang<br>18. KP2KP Sidrap<br>19. KP2KP Malili<br>20. KP2KP Masamba |

| NO. | N A M A                                                                | LOKASI   | WILAYAH KERJA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        |          | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                               | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                        |          |                                                                                                                | 21. KP2KP Makale<br>22. KP2KP Benteng<br>23. KP2KP Sinjai<br>24. KP2KP Bontosunggu<br>25. KP2KP Sungguminasa<br>26. KP2KP Takalar<br>27. KP2KP Watansoppeng<br>28. KP2KP Sengkang<br>29. KP2KP Pangkajene<br>30. KP2KP Unaaha<br>31. KP2KP Polewali<br>32. KP2KP Mamasa<br>33. KP2KP Pasangkayu<br>34. KP2KP Lasusua<br>35. KP2KP Rumbia<br>36. KP2KP Raha                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31. | KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA | Manado   | a. Provinsi Sulawesi Utara<br>b. Provinsi Sulawesi Tengah<br>c. Provinsi Gorontalo<br>d. Provinsi Maluku Utara | 1. KPP Pratama Manado<br>2. KPP Pratama Gorontalo<br>3. KPP Pratama Bitung<br>4. KPP Pratama Kotamobagu<br>5. KPP Pratama Tahuna<br>6. KPP Pratama Palu<br>7. KPP Pratama Luwuk<br>8. KPP Pratama Poso<br>9. KPP Pratama Toli-Toli<br>10. KPP Pratama Ternate<br>11. KPP Pratama Tobelo<br>12. KP2KP Tomohon<br>13. KP2KP Limboto<br>14. KP2KP Marissa<br>15. KP2KP Tilamuta<br>16. KP2KP Tondano<br>17. KP2KP Amurang<br>18. KP2KP Talaud<br>19. KP2KP Banawa<br>20. KP2KP Parigi<br>21. KP2KP Banggai<br>22. KP2KP Bungku<br>23. KP2KP Buol<br>24. KP2KP Sanana<br>25. KP2KP Tidore<br>26. KP2KP Labuha<br>27. KP2KP Maba |
| 32. | KANTOR WILAYAH DJP BALI                                                | Denpasar | Provinsi Bali                                                                                                  | 1. KPP Madya Denpasar<br>2. KPP Pratama Denpasar Barat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| NO. | N A M A                             | LOKASI   | WILAYAH KERJA                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |          | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                   | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                     |          |                                                                    | 3. KPP Pratama Denpasar Timur<br>4. KPP Pratama Singaraja<br>5. KPP Pratama Badung Selatan<br>6. KPP Pratama Badung Utara<br>7. KPP Pratama Gianyar<br>8. KPP Pratama Tabanan<br>9. KP2KP Kerobokan<br>10. KP2KP Ubud<br>11. KP2KP Amlapura<br>12. KP2KP Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33. | KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA    | Mataram  | a. Provinsi Nusa Tenggara Barat<br>b. Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1. KPP Pratama Mataram Barat<br>2. KPP Pratama Mataram Timur<br>3. KPP Pratama Raba Bima<br>4. KPP Pratama Sumbawa Besar<br>5. KPP Pratama Praya<br>6. KPP Pratama Maumere<br>7. KPP Pratama Kupang<br>8. KPP Pratama Ende<br>9. KPP Pratama Ruteng<br>10. KPP Pratama Atambua<br>11. KPP Pratama Waingapu<br>12. KP2KP Dompur<br>13. KP2KP Taliwang<br>14. KP2KP Gerung<br>15. KP2KP Selong<br>16. KP2KP Larantuka<br>17. KP2KP Baa<br>18. KP2KP Soe<br>19. KP2KP Bajawa<br>20. KP2KP Labuan Bajo<br>21. KP2KP Kalabahi<br>22. KP2KP Waikabubak |
| 34. | KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU | Jayapura | a. Provinsi Maluku<br>b. Provinsi Papua<br>c. Provinsi Papua Barat | 1. KPP Pratama Ambon<br>2. KPP Pratama Sorong<br>3. KPP Pratama Jayapura<br>4. KPP Pratama Timika<br>5. KPP Pratama Biak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO. | N A M A | LOKASI | WILAYAH KERJA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |        | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |         |        |                                  | 6. KPP Pratama Manokwari<br>7. KPP Pratama Merauke<br>8. KP2KP Namlea<br>9. KP2KP Masohi<br>10. KP2KP Piru<br>11. KP2KP Bula<br>12. KP2KP Dobo<br>13. KP2KP Tual<br>14. KP2KP Saumlaki<br>15. KP2KP Fakfak<br>16. KP2KP Teminabuan<br>17. KP2KP Kaimana<br>18. KP2KP Sarmi<br>19. KP2KP Wamena<br>20. KP2KP Serui<br>21. KP2KP Nabire<br>22. KP2KP Bintuni |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA, LOKASI, JENIS DAN WILAYAH KERJA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

| NO                                            | NAMA                               | LOKASI  | JENIS<br>KPP            | WILAYAH KERJA                          |       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------|-------|
|                                               |                                    |         |                         | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | KP2KP |
| Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar |                                    |         |                         |                                        |       |
| 1.                                            | KPP Wajib Pajak<br>Besar Satu      | Jakarta | Wajib<br>Pajak<br>Besar | Seluruh Indonesia                      |       |
| 2.                                            | KPP Wajib Pajak<br>Besar Dua       | Jakarta | Wajib<br>Pajak<br>Besar | Seluruh Indonesia                      |       |
| 3.                                            | KPP Wajib Pajak<br>Besar Tiga      | Jakarta | Wajib<br>Pajak<br>Besar | Seluruh Indonesia                      |       |
| 4.                                            | KPP Wajib Pajak<br>Besar Empat     | Jakarta | Wajib<br>Pajak<br>Besar | Seluruh Indonesia                      |       |
| Kanwil DJP Jakarta Khusus                     |                                    |         |                         |                                        |       |
| 5.                                            | KPP Penanaman<br>Modal Asing Satu  | Jakarta | Madya                   | Seluruh Indonesia                      |       |
| 6.                                            | KPP Penanaman<br>Modal Asing Dua   | Jakarta | Madya                   | Seluruh Indonesia                      |       |
| 7.                                            | KPP Penanaman<br>Modal Asing Tiga  | Jakarta | Madya                   | Seluruh Indonesia                      |       |
| 8.                                            | KPP Penanaman<br>Modal Asing Empat | Jakarta | Madya                   | Seluruh Indonesia                      |       |
| 9.                                            | KPP Penanaman<br>Modal Asing Lima  | Jakarta | Madya                   | Seluruh Indonesia                      |       |

| NO              | NAMA                           | LOKASI      | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                        |                                   |
|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                 |                                |             |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                     | KP2KP                             |
| 10.             | KPP Penanaman Modal Asing Enam | Jakarta     | Madya     | Seluruh Indonesia                                                                    |                                   |
| 11.             | KPP Badan dan Orang Asing      | Jakarta     | Madya     | DKI Jakarta                                                                          |                                   |
| 12.             | KPP Minyak dan Gas Bumi        | Jakarta     | Madya     | Seluruh Indonesia                                                                    |                                   |
| 13.             | KPP Perusahaan Masuk Bursa     | Jakarta     | Madya     | Seluruh Indonesia                                                                    |                                   |
| Kanwil DJP Aceh |                                |             |           |                                                                                      |                                   |
| 14.             | KPP Pratama Banda Aceh         | Banda Aceh  | Pratama   | Kota Banda Aceh                                                                      | 1. Sigli<br>2. Sabang             |
| 15.             | KPP Pratama Aceh Besar         | Banda Aceh  | Pratama   | 1. Kab. Aceh Besar<br>2. Kab. Pidie<br>3. Kota Sabang                                |                                   |
| 16.             | KPP Pratama Lhokseumawe        | Lhokseumawe | Pratama   | 1. Kab. Aceh Utara<br>2. Kota Lhokseumawe                                            | Lhoksukon                         |
| 17.             | KPP Pratama Meulaboh           | Meulaboh    | Pratama   | 1. Kab. Aceh Jaya<br>2. Kab. Nagan Raya<br>3. Kab. Aceh Barat                        | 1. Calang<br>2. Suka Makmur       |
| 18.             | KPP Pratama Bireuen            | Bireuen     | Pratama   | 1. Kab. Aceh Tengah<br>2. Kab. Bener Meriah<br>3. Kab. Bireuen<br>4. Kab. Pidie Jaya | 1. Takengon<br>2. Rimba Raya      |
| 19.             | KPP Pratama Langsa             | Langsa      | Pratama   | 1. Kab. Aceh Tamiang<br>2. Kab. Gayo Lues                                            | 1. Karang Baru<br>2. Blangkejeren |

| NO                          | NAMA                      | LOKASI        | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                               |                                |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                             |                           |               |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                            | KP2KP                          |
| 20.                         | KPP Pratama Tapaktuan     | Tapaktuan     | Pratama   | 3. Kab. Aceh Timur<br>4. Kota Langsa<br>1. Kab. Aceh Barat Daya<br>2. Kab. Aceh Selatan<br>3. Kab. Simeulue | 1. Blangpidie<br>2. Sinabang   |
| 21.                         | KPP Pratama Subulussalam  | Subulus-salam | Pratama   | 1. Kab. Aceh Singkil<br>2. Kab. Aceh Tenggara<br>3. Kota Subulussalam                                       | 1. Aceh Singkil<br>2. Kutacane |
| Kanwil DJP Sumatera Utara I |                           |               |           |                                                                                                             |                                |
| 22.                         | KPP Madya Medan           | Medan         | Madya     | Sebagian Provinsi Sumatera Utara                                                                            |                                |
| 23.                         | KPP Pratama Medan Barat   | Medan         | Pratama   | Kec. Medan Barat                                                                                            |                                |
| 24.                         | KPP Pratama Medan Belawan | Medan         | Pratama   | 1. Kec. Medan Belawan<br>2. Kec. Medan Labuhan<br>3. Kec. Medan Marelan<br>4. Kec. Medan Deli               |                                |
| 25.                         | KPP Pratama Medan Timur   | Medan         | Pratama   | 1. Kec. Medan Timur<br>2. Kec. Medan Perjuangan<br>3. Kec. Medan Tembung                                    |                                |

| NO  | NAMA                      | LOKASI      | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                   |       |
|-----|---------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                           |             |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                | KP2KP |
| 26. | KPP Pratama Medan Polonia | Medan       | Pratama   | 1. Kec. Medan Polonia<br>2. Kec. Medan Maimun<br>3. Kec. Medan Baru<br>4. Kec. Medan Selayang<br>5. Kec. Medan Tuntungan<br>6. Kec. Medan Johor |       |
| 27. | KPP Pratama Medan Kota    | Medan       | Pratama   | 1. Kec. Medan Kota<br>2. Kec. Medan Area<br>3. Kec. Medan Amplas<br>4. Kec. Medan Denai                                                         |       |
| 28. | KPP Pratama Medan Petisah | Medan       | Pratama   | 1. Kec. Medan Petisah<br>2. Kec. Medan Sunggal<br>3. Kec. Medan Helvetia                                                                        |       |
| 29. | KPP Pratama Binjai        | Binjai      | Pratama   | 1. Kota Binjai<br>2. Kab. Langkat                                                                                                               |       |
| 30. | KPP Pratama Lubuk Pakam   | Lubuk Pakam | Pratama   | Kab. Deli Serdang                                                                                                                               |       |

| NO                           | NAMA                         | LOKASI           | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                          |                                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                              |                              |                  |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                 | KP2KP                            |
| Kanwil DJP Sumatera Utara II |                              |                  |              |                                                                                                                                        |                                  |
| 31.                          | KPP Pratama Tebing Tinggi    | Tebing Tinggi    | Pratama      | 1. Kota Tebing Tinggi<br>2. Kab. Serdang Bedagai                                                                                       | Tanjung Balai                    |
| 32.                          | KPP Pratama Kisaran          | Kisaran          | Pratama      | 1. Kota Tanjung Balai<br>2. Kab. Asahan<br>3. Kab. Batu Bara                                                                           |                                  |
| 33.                          | KPP Pratama Rantau Prapat    | Rantau Prapat    | Pratama      | 1. Kab. Labuhanbatu Utara<br>2. Kab. Labuhanbatu Selatan<br>3. Kab. Labuhanbatu                                                        | 1. Kualuh Hulu<br>2. Kota Pinang |
| 34.                          | KPP Pratama Pematang Siantar | Pematang Siantar | Pratama      | 1. Kab. Simalungun<br>2. Kota Pematang Siantar                                                                                         | Perdagangan                      |
| 35.                          | KPP Pratama Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | Pratama      | 1. Kab. Mandailing Natal<br>2. Kab. Padang Lawas<br>3. Kota Padang Sidempuan<br>4. Kab. Tapanuli Selatan<br>5. Kab. Padang Lawas Utara | 1. Panyabungan<br>2. Sibuhuan    |

| NO              | NAMA                            | LOKASI    | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                           |                                 |
|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                 |                                 |           |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                        | KP2KP                           |
| 36.             | KPP Pratama Sibolga             | Sibolga   | Pratama   | 1. Kab. Tapanuli Tengah<br>2. Kota Sibolga<br>3. Kab. Nias<br>4. Kab. Nias Selatan<br>5. Kab. Nias Utara<br>6. Kab. Nias Barat<br>7. Kota Gunung Sitoli | 1. Pandan<br>2. Gunung Sitoli   |
| 37.             | KPP Pratama Balige              | Balige    | Pratama   | 1. Kab. Humbang Hasundutan<br>2. Kab. Tapanuli Utara<br>3. Kab. Samosir<br>4. Kab. Toba                                                                 | 1. Dolok Sanggul<br>2. Tarutung |
| 38.             | KPP Pratama Kabanjahe           | Kabanjahe | Pratama   | 1. Kab. Dairi<br>2. Kab. Pakpak Bharat<br>3. Kab. Karo                                                                                                  | Sidikalang                      |
| Kanwil DJP Riau |                                 |           |           |                                                                                                                                                         |                                 |
| 39.             | KPP Madya Pekanbaru             | Pekanbaru | Madya     | Provinsi Riau                                                                                                                                           |                                 |
| 40.             | KPP Pratama Pekanbaru Senapelan | Pekanbaru | Pratama   | 1. Kec. Senapelan<br>2. Kec. Pekanbaru Kota<br>3. Kec. Sail<br>4. Kec. Tenayan Raya<br>5. Kec. Rumbai<br>6. Kec. Rumbai Pesisir<br>7. Kec. Limapuluh    |                                 |



| NO                        | NAMA                          | LOKASI            | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                               |                             |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                               |                   |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                            | KP2KP                       |
| 41.                       | KPP Pratama Pekanbaru Tampan  | Pekanbaru         | Pratama   | 1. Kec. Tampan<br>2. Kec. Payung Sekaki<br>3. Kec. Marpoyan Damai<br>4. Kec. Bukit Raya<br>5. Kec. Sukajadi | Bagansiapiapi               |
| 42.                       | KPP Pratama Dumai             | Dumai             | Pratama   | 1. Kab. Rokan Hilir<br>2. Kota Dumai                                                                        |                             |
| 43.                       | KPP Pratama Rengat            | Rengat            | Pratama   | 1. Kab. Indragiri Hilir<br>2. Kab. Kuantan Singingi<br>3. Kab. Indragiri Hulu                               |                             |
| 44.                       | KPP Pratama Bengkalis         | Bengkalis         | Pratama   | 1. Kab. Bengkalis<br>2. Kab. Kepulauan Meranti                                                              | 1. Duri<br>2. Selat Panjang |
| 45.                       | KPP Pratama Bangkinang        | Pekanbaru         | Pratama   | 1. Kab. Kampar<br>2. Kab. Rokan Hulu                                                                        | Pasir Pangarayan            |
| 46.                       | KPP Pratama Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci | Pratama   | 1. Kab. Siak<br>2. Kab. Pelalawan                                                                           | Siak Sri Indrapura          |
| Kanwil DJP Kepulauan Riau |                               |                   |           |                                                                                                             |                             |
| 47.                       | KPP Madya Batam               | Batam             | Madya     | Provinsi Kepulauan Riau                                                                                     | Ranai                       |
| 48.                       | KPP Pratama Tanjung Pinang    | Tanjung Pinang    | Pratama   | 1. Kab. Natuna<br>2. Kab. Kepulauan Anambas<br>3. Kota Tanjung Pinang                                       |                             |

| NO                                  | NAMA                              | LOKASI                | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                     |                                   |                       |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                          | KP2KP        |
| 49.                                 | KPP Pratama Batam Utara           | Batam                 | Pratama   | 1. Kec. Belakang Padang<br>2. Kec. Batu Ampar<br>3. Kec. Sekupang<br>4. Kec. Nongsa<br>5. Kec. Galang<br>6. Kec. Lubuk Baja                               | Tanjung Batu |
| 50.                                 | KPP Pratama Batam Selatan         | Batam                 | Pratama   | 1. Kec. Sei Beduk<br>2. Kec. Bulang<br>3. Kec. Bengkong<br>4. Kec. Batam Kota<br>5. Kec. Sagulung<br>6. Kec. Batu Aji                                     |              |
| 51.                                 | KPP Pratama Tanjung Balai Karimun | Tanjung Balai Karimun | Pratama   | Kab. Karimun                                                                                                                                              |              |
| 52.                                 | KPP Pratama Bintan                | Tanjung Pinang        | Pratama   | 1. Kab. Lingga<br>2. Kab. Bintan                                                                                                                          |              |
| Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi |                                   |                       |           |                                                                                                                                                           |              |
| 53.                                 | KPP Pratama Padang Satu           | Padang                | Pratama   | 1. Kab. Padang Pariaman<br>2. Kota Pariaman<br>3. Kec. Padang Barat<br>4. Kec. Padang Utara<br>5. Kec. Nanggalo<br>6. Kec. Koto Tengah<br>7. Kec. Kuranji | Pariaman     |

| NO  | NAMA                    | LOKASI      | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
|-----|-------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |             |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                           | KP2KP                                                                         |
| 54. | KPP Pratama Padang Dua  | Padang      | Pratama   | 1. Kab. Pesisir Selatan<br>2. Kab. Kepulauan Mentawai<br>3. Kec. Padang Selatan<br>4. Kec. Padang Timur<br>5. Kec. Pauh<br>6. Kec. Lubuk Begalung<br>7. Kec. Lubuk Kilangan<br>8. Kec. Bungus Teluk Kabung | 1. Tua Pejat<br>2. Painan                                                     |
| 55. | KPP Pratama Bukittinggi | Bukittinggi | Pratama   | 1. Kab. Agam<br>2. Kab. Pasaman<br>3. Kota Padang Panjang<br>4. Kab. Pasaman Barat<br>5. Kota Bukittinggi                                                                                                  | 1. Lubuk Basung<br>2. Lubuk Sikaping<br>3. Padang Panjang<br>4. Simpang Ampat |
| 56. | KPP Pratama Solok       | Solok       | Pratama   | 1. Kab. Dharmas Raya<br>2. Kab. Sijunjung<br>3. Kab. Solok Selatan<br>4. Kota Sawahlunto<br>5. Kota Solok<br>6. Kab. Solok                                                                                 | 1. Kotabaru<br>2. Muaro Sijunjung<br>3. Padang Aro<br>4. Sawahlunto           |

| NO  | NAMA                          | LOKASI      | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                             |                                  |
|-----|-------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                               |             |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                          | KP2KP                            |
| 57. | KPP Pratama Payakumbuh        | Payakumbuh  | Pratama   | 1. Kab. Limapuluh Kota<br>2. Kota Payakumbuh<br>3. Kab. Tanah Datar                                                                                       | Batu Sangkar                     |
| 58. | KPP Pratama Jambi Telanaipura | Jambi       | Pratama   | 1. Kab. Muaro Jambi<br>2. Kec. Pasar Jambi<br>3. Kec. Telanaipura<br>4. Kec. Kota Baru<br>5. Kec. Alam Barajo<br>6. Kec. Danau Sipin                      | Sengeti                          |
| 59. | KPP Pratama Jambi Pelayangan  | Jambi       | Pratama   | 1. Kab. Batanghari<br>2. Kec. Jelutung<br>3. Kec. Jambi Selatan<br>4. Kec. Jambi Timur<br>5. Kec. Paal Merah<br>6. Kec. Pelayangan<br>7. Kec. Danau Teluk | Muara Bulian                     |
| 60. | KPP Pratama Muara Bungo       | Muara Bungo | Pratama   | 1. Kab. Bungo<br>2. Kab. Tebo                                                                                                                             | 1. Rimbo Bujang<br>2. Muara Tebo |

| NO                                                        | NAMA                             | LOKASI        | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                           |                                  |               |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                           | KP2KP                            |
| 61.                                                       | KPP Pratama Bangko               | Bangko        | Pratama   | 1. Kab. Kerinci<br>2. Kota Sungai Penuh<br>3. Kab. Merangin<br>4. Kab. Sarolangun                                                                          | 1. Sungai Penuh<br>2. Sarolangun |
| 62.                                                       | KPP Pratama Kuala Tungkal        | Kuala Tungkal | Pratama   | 1. Kab. Tanjung Jabung Barat<br>2. Kab. Tanjung Jabung Timur                                                                                               | Muara Sabak                      |
| Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung |                                  |               |           |                                                                                                                                                            |                                  |
| 63.                                                       | KPP Madya Palembang              | Palembang     | Madya     | 1. Provinsi Sumatera Selatan<br>2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                                                      |                                  |
| 64.                                                       | KPP Pratama Palembang Ilir Timur | Palembang     | Pratama   | 1. Kec. Ilir Timur I<br>2. Kec. Ilir Timur II<br>3. Kec. Ilir Timur III<br>4. Kec. Kemuning<br>5. Kec. Sako<br>6. Kec. Kalidoni<br>7. Kec. Sematang Borang |                                  |
| 65.                                                       | KPP Pratama Palembang Ilir Barat | Palembang     | Pratama   | 1. Kec. Ilir Barat I<br>2. Kec. Ilir Barat II<br>3. Kec. Bukit Kecil<br>4. Kec. Gandus<br>5. Kec. Sukarami                                                 |                                  |

| NO  | NAMA                               | LOKASI         | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                              |                             |
|-----|------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                    |                |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                     | KP2KP                       |
| 66. | KPP Pratama Palembang Seberang Ulu | Palembang      | Pratama      | 6. Kec. Alang Alang Lebar<br>1. Kec. Seberang Ulu I<br>2. Kec. Jakabaring<br>3. Kec. Seberang Ulu II<br>4. Kec. Plaju<br>5. Kec. Kertapati | 1. Muaradua<br>2. Martapura |
| 67. | KPP Pratama Baturaja               | Baturaja       | Pratama      | 1. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan<br>2. Kab. Ogan Komering Ulu Timur<br>3. Kab. Ogan Komering Ulu                                          |                             |
| 68. | KPP Pratama Lubuk Linggau          | Lubuk Linggau  | Pratama      | 1. Kab. Musi Rawas<br>2. Kab. Musi Rawas Utara<br>3. Kota Lubuk Linggau                                                                    |                             |
| 69. | KPP Pratama Pangkal Pinang         | Pangkal Pinang | Pratama      | Kota Pangkal Pinang                                                                                                                        | Manggar                     |
| 70. | KPP Pratama Tanjung Pandan         | Tanjung Pandan | Pratama      | 1. Kab. Belitung Timur<br>2. Kab. Belitung                                                                                                 |                             |
| 71. | KPP Pratama Lahat                  | Lahat          | Pratama      | 1. Kota Pagar Alam<br>2. Kab. Empat Lawang<br>3. Kab. Lahat                                                                                |                             |
| 72. | KPP Pratama Kayu                   | Kayu Agung     | Pratama      | 1. Kab. Ogan Ilir                                                                                                                          | Indralaya                   |

| NO                              | NAMA                                   | LOKASI            | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                           |                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                 |                                        |                   |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                  | KP2KP                                                |
| 73.                             | Agung<br><br>KPP Pratama<br>Prabumulih | Prabumulih        | Pratama      | 2. Kab. Ogan<br>Komeriŋg Ilir<br><br>1. Kab. Muara<br>Enim<br><br>2. Kab. Penukal<br>Abab Lematang<br>Ilir<br><br>3. Kota<br>Prabumulih | Muara Enim                                           |
| 74.                             | KPP Pratama Sekayu                     | Sekayu            | Pratama      | 1. Kab. Musi<br>Banyuasin<br><br>2. Kab. Banyuasin                                                                                      | Pangkalan Balai                                      |
| 75.                             | KPP Pratama Bangka                     | Pangkal<br>Pinang | Pratama      | 1. Kab. Bangka<br>Barat<br><br>2. Kab. Bangka<br>Induk<br><br>3. Kab. Bangka<br>Selatan<br><br>4. Kab. Bangka<br>Tengah                 | 1. Muntok<br>2. Sungai Liat<br>3. Toboali<br>4. Koba |
| Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung |                                        |                   |              |                                                                                                                                         |                                                      |
| 76.                             | KPP Pratama<br>Bengkulu                | Bengkulu          | Pratama      | 1. Kab. Bengkulu<br>Selatan<br><br>2. Kab. Kaur<br><br>3. Kota Bengkulu<br><br>4. Kab. Seluma                                           | 1. Manna<br>2. Bintuhan                              |
| 77.                             | KPP Pratama Metro                      | Metro             | Pratama      | 1. Kab. Lampung<br>Tengah<br><br>2. Kab. Lampung<br>Timur<br><br>3. Kota Metro                                                          | 1. Bandarjaya<br>2. Sukadana                         |
| 78.                             | KPP Pratama Tanjung                    | Bandar            | Pratama      | 1. Kec. Tanjung                                                                                                                         |                                                      |

| NO  | NAMA                        | LOKASI            | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                          |       |
|-----|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                             |                   |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                 | KP2KP |
| 79. | Karang                      | Lampung           | Pratama      | Karang Timur<br>2. Kec. Kedamaian<br>3. Kec. Tanjung<br>Karang Barat<br>4. Kec. Tanjung<br>Karang Pusat<br>5. Kec. Enggal<br>6. Kec. Kemiling<br>7. Kec.<br>Langkapura |       |
|     | KPP Pratama Kedaton         | Bandar<br>Lampung |              | 1. Kec. Kedaton<br>2. Kec. Labuhan<br>Ratu<br>3. Kec. Sukarame<br>4. Kec. Way Halim<br>5. Kec. Rajabasa<br>6. Kec. Sukabumi<br>7. Kec. Tanjung<br>Senang               |       |
| 80. | KPP Pratama Teluk<br>Betung | Bandar<br>Lampung | Pratama      | 1. Kec.<br>Telukbetung<br>Barat<br>2. Kec.<br>Telukbetung<br>Selatan<br>3. Kec.<br>Telukbetung<br>Timur                                                                |       |



| NO  | NAMA                   | LOKASI          | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                          |                                       |
|-----|------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                        |                 |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                 | KP2KP                                 |
| 81. | KPP Pratama Natar      | Lampung Selatan | Pratama      | 4. Kec. Bumi Waras<br>5. Kec. Telukbetung Utara<br>6. Kec. Panjang<br>1. Kab. Lampung Selatan<br>2. Kab. Pesawaran<br>3. Kab. Tanggamus<br>4. Kab. Pringsewu           | 1. Kalianda<br>2. Pringsewu           |
| 82. | KPP Pratama Kotabumi   | Kotabumi        | Pratama      | 1. Kab. Lampung Barat<br>2. Kab. Lampung Utara<br>3. Kab. Pesisir Barat<br>4. Kab. Tulang Bawang<br>5. Kab. Tulang Bawang Barat<br>6. Kab. Mesuji<br>7. Kab. Way Kanan | 1. Liwa<br>2. Menggala<br>3. Baradatu |
| 83. | KPP Pratama Curup      | Curup           | Pratama      | 1. Kab. Kepahiang<br>2. Kab. Lebong<br>3. Kab. Rejang Lebong                                                                                                           | Kepahiang                             |
| 84. | KPP Pratama Argamakmur | Argamakmur      | Pratama      | 1. Kab. Bengkulu Utara                                                                                                                                                 | Muko-Muko                             |

| NO                       | NAMA                                    | LOKASI  | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                       |       |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                          |                                         |         |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                              | KP2KP |
|                          |                                         |         |              | 2. Kab. Bengkulu<br>Tengah<br>3. Kab. Muko-<br>Muko                                                 |       |
| Kanwil DJP Jakarta Pusat |                                         |         |              |                                                                                                     |       |
| 85.                      | KPP Madya Jakarta<br>Pusat              | Jakarta | Madya        | Kota Jakarta<br>Pusat                                                                               |       |
| 86.                      | KPP Pratama Jakarta<br>Menteng Satu     | Jakarta | Pratama      | Kel. Kebon Sirih                                                                                    |       |
| 87.                      | KPP Pratama Jakarta<br>Menteng Dua      | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Menteng<br>2. Kel. Pegangsaan<br>3. Kel. Cikini                                             |       |
| 88.                      | KPP Pratama Jakarta<br>Menteng Tiga     | Jakarta | Pratama      | Kel. Gondangdia                                                                                     |       |
| 89.                      | KPP Pratama Jakarta<br>Tanah Abang Satu | Jakarta | Pratama      | Kel. Karet Tengsin                                                                                  |       |
| 90.                      | KPP Pratama Jakarta<br>Tanah Abang Dua  | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Petamburan<br>2. Kel. Kebon<br>Melati<br>3. Kel. Kebon<br>Kacang<br>4. Kel. Kampung<br>Bali |       |
| 91.                      | KPP Pratama Jakarta<br>Tanah Abang Tiga | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Bendungan<br>Hilir<br>2. Kel. Gelora                                                        |       |
| 92.                      | KPP Pratama Jakarta<br>Senen            | Jakarta | Pratama      | Kec. Senen                                                                                          |       |
| 93.                      | KPP Pratama Jakarta<br>Cempaka Putih    | Jakarta | Pratama      | 1. Kec. Cempaka<br>Putih<br>2. Kec. Johar Baru                                                      |       |
| 94.                      | KPP Pratama Jakarta                     | Jakarta | Pratama      | Kel. Gambir                                                                                         |       |

| NO                       | NAMA                                             | LOKASI  | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                    |       |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                          |                                                  |         |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                           | KP2KP |
| 95.                      | Gambir Satu<br>KPP Pratama Jakarta<br>Gambir Dua | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Cideng<br>2. Kel. Petojo<br>Selatan                                      |       |
| 96.                      | KPP Pratama Jakarta<br>Gambir Tiga               | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Duri Pulo<br>2. Kel. Petojo<br>Utara                                     |       |
| 97.                      | KPP Pratama Jakarta<br>Gambir Empat              | Jakarta | Pratama      | Kel. Kebon Kelapa                                                                |       |
| 98.                      | KPP Pratama Jakarta<br>Sawah Besar Satu          | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Gunung<br>Sahari Utara<br>2. Kel. Mangga<br>Dua Selatan                  |       |
| 99.                      | KPP Pratama Jakarta<br>Sawah Besar Dua           | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Pasar Baru<br>2. Kel. Kartini<br>3. Kel. Karang<br>Anyar                 |       |
| 100.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Kemayoran                 | Jakarta | Pratama      | Kec. Kemayoran                                                                   |       |
| Kanwil DJP Jakarta Barat |                                                  |         |              |                                                                                  |       |
| 101.                     | KPP Madya Jakarta<br>Barat                       | Jakarta | Madya        | Kota Jakarta Barat                                                               |       |
| 102.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Palmerah                  | Jakarta | Pratama      | Kec. Palmerah                                                                    |       |
| 103.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Tamansari Satu            | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Maphar<br>2. Kel. Tamansari<br>3. Kel. Mangga<br>Besar<br>4. Kel. Tangki |       |
| 104.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Tamansari Dua             | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Krukut<br>2. Kel. Keagungan<br>3. Kel. Glodok                            |       |

| NO                           | NAMA                                     | LOKASI  | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                            |       |
|------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                              |                                          |         |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                   | KP2KP |
| 105.                         | KPP Pratama Jakarta<br>Tambora           | Jakarta | Pratama      | 4. Kel. Pinangsia<br>Kec. Tambora                                                                        |       |
| 106.                         | KPP Pratama Jakarta<br>Cengkareng        | Jakarta | Pratama      | Kec. Cengkareng                                                                                          |       |
| 107.                         | KPP Pratama Jakarta<br>Kebon Jeruk Satu  | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Sukabumi<br>Selatan<br>2. Kel. Sukabumi<br>Utara<br>3. Kel. Kelapa Dua<br>4. Kel. Kebon<br>Jeruk |       |
| 108.                         | KPP Pratama Jakarta<br>Kebon Jeruk Dua   | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Duri Kepa<br>2. Kel. Kedoya<br>Selatan<br>3. Kel. Kedoya<br>Utara                                |       |
| 109.                         | KPP Pratama Jakarta<br>Grogol Petamburan | Jakarta | Pratama      | Kec. Grogol<br>Petamburan                                                                                |       |
| 110.                         | KPP Pratama Jakarta<br>Kalideres         | Jakarta | Pratama      | Kec. Kalideres                                                                                           |       |
| 111.                         | KPP Pratama Jakarta<br>Kembangan         | Jakarta | Pratama      | Kec. Kembangan                                                                                           |       |
| Kanwil DJP Jakarta Selatan I |                                          |         |              |                                                                                                          |       |
| 112.                         | KPP Madya Jakarta<br>Selatan I           | Jakarta | Madya        | Sebagian Kota<br>Jakarta Selatan                                                                         |       |
| 113.                         | KPP Pratama Jakarta<br>Setiabudi Satu    | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Karet<br>2. Kel. Karet<br>Kuningan                                                               |       |
| 114.                         | KPP Pratama Jakarta<br>Setiabudi Dua     | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Setiabudi<br>2. Kel. Guntur                                                                      |       |

| NO                            | NAMA                                           | LOKASI  | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                          |       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------|-------|
|                               |                                                |         |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | KP2KP |
| 115.                          | KPP Pratama Jakarta<br>Setiabudi Tiga          | Jakarta | Pratama      | 3. Kel. Pasar<br>Manggis               |       |
| 116.                          | KPP Pratama Jakarta<br>Setiabudi Empat         | Jakarta | Pratama      | 4. Kel. Menteng<br>Atas                |       |
| 117.                          | KPP Pratama Jakarta<br>Mampang Prapatan        | Jakarta | Pratama      | Kel. Karet<br>Semanggi                 |       |
| 118.                          | KPP Pratama Jakarta<br>Tebet                   | Jakarta | Pratama      | Kel. Kuningan<br>Timur                 |       |
| 119.                          | KPP Pratama Jakarta<br>Pancoran                | Jakarta | Pratama      | Kec. Mampang<br>Prapatan               |       |
|                               |                                                |         |              | Kec. Tebet                             |       |
|                               |                                                |         |              | Kec. Pancoran                          |       |
| Kanwil DJP Jakarta Selatan II |                                                |         |              |                                        |       |
| 120.                          | KPP Pratama Jakarta<br>Kebayoran Baru Satu     | Jakarta | Pratama      | Kel. Senayan                           |       |
| 121.                          | KPP Pratama Jakarta<br>Kebayoran Baru Dua      | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Gandaria<br>Utara              |       |
|                               |                                                |         |              | 2. Kel. Cipete<br>Utara                |       |
|                               |                                                |         |              | 3. Kel. Pulo                           |       |
|                               |                                                |         |              | 4. Kel. Kramat<br>Pela                 |       |
| 122.                          | KPP Pratama Jakarta<br>Kebayoran Baru Tiga     | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Melawai                        |       |
|                               |                                                |         |              | 2. Kel. Petogogan                      |       |
|                               |                                                |         |              | 3. Kel. Gunung                         |       |
| 123.                          | KPP Pratama Jakarta<br>Kebayoran Baru<br>Empat | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Rawa Barat                     |       |
|                               |                                                |         |              | 2. Kel. Selong                         |       |
| 124.                          | KPP Pratama Jakarta<br>Kebayoran Lama          | Jakarta | Pratama      | Kec. Kebayoran<br>Lama                 |       |

| NO                       | NAMA                                | LOKASI  | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                        |       |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                          |                                     |         |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                               | KP2KP |
| 125.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Pesanggrahan | Jakarta | Pratama      | Kec.<br>Pesanggrahan                                                                                 |       |
| 126.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Pasar Minggu | Jakarta | Pratama      | Kec. Pasar Minggu                                                                                    |       |
| 127.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Jagakarsa    | Jakarta | Pratama      | Kec. Jagakarsa                                                                                       |       |
| 128.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Cilandak     | Jakarta | Pratama      | Kec. Cilandak                                                                                        |       |
| Kanwil DJP Jakarta Timur |                                     |         |              |                                                                                                      |       |
| 129.                     | KPP Madya Jakarta<br>Timur          | Jakarta | Madya        | Kota Jakarta<br>Timur                                                                                |       |
| 130.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Matraman     | Jakarta | Pratama      | Kec. Matraman                                                                                        |       |
| 131.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Jatinegara   | Jakarta | Pratama      | Kec. Jatinegara                                                                                      |       |
| 132.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Pulogadung   | Jakarta | Pratama      | Kec. Pulogadung                                                                                      |       |
| 133.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Cakung Satu  | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Jatinegara<br>2. Kel.<br>Penggilingan<br>3. Kel. Rawa<br>Terate                              |       |
| 134.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Cakung Dua   | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Pulogebang<br>2. Kel. Ujung<br>Menteng<br>3. Kel. Cakung<br>Timur<br>4. Kel. Cakung<br>Barat |       |
| 135.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Kramat Jati  | Jakarta | Pratama      | 1. Kec. Kramat Jati<br>2. Kec. Makasar                                                               |       |
| 136.                     | KPP Pratama Jakarta                 | Jakarta | Pratama      | Kec. Duren Sawit                                                                                     |       |

| NO                       | NAMA                                             | LOKASI  | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                          |                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                          |                                                  |         |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                 | KP2KP               |
| 137.                     | Duren Sawit<br>KPP Pratama Jakarta<br>Pasar Rebo | Jakarta | Pratama      | 1. Kec. Pasar Rebo<br>2. Kec. Cipayung<br>3. Kec. Ciracas              |                     |
| Kanwil DJP Jakarta Utara |                                                  |         |              |                                                                        |                     |
| 138.                     | KPP Madya Jakarta<br>Utara                       | Jakarta | Madya        | Kota Jakarta<br>Utara                                                  |                     |
| 139.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Penjaringan               | Jakarta | Pratama      | 1. Kel.<br>Penjaringan<br>2. Kel. Pejagalan                            |                     |
| 140.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Tanjung Priok             | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Tanjung<br>Priok<br>2. Kel. Kebon<br>Bawang<br>3. Kel. Warakas |                     |
| 141.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Kelapa Gading             | Jakarta | Pratama      | Kec. Kelapa<br>Gading                                                  |                     |
| 142.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Pademangan                | Jakarta | Pratama      | 1. Kab. Kepulauan<br>Seribu<br>2. Kec.<br>Pademangan                   | Kepulauan<br>Seribu |
| 143.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Koja                      | Jakarta | Pratama      | 1. Kec. Koja<br>2. Kec. Cilincing                                      |                     |
| 144.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Pluit                     | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Pluit<br>2. Kel. Kamal<br>Muara<br>3. Kel. Kapuk<br>Muara      |                     |
| 145.                     | KPP Pratama Jakarta<br>Sunter                    | Jakarta | Pratama      | 1. Kel. Sunter<br>Agung<br>2. Kel. Papanggo<br>3. Kel. Sunter          |                     |

| NO                | NAMA                        | LOKASI            | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                 |       |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   |                             |                   |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                        | KP2KP |
|                   |                             |                   |              | Jaya<br>4. Kel. Sungai<br>Bambu                                                                                                               |       |
| Kanwil DJP Banten |                             |                   |              |                                                                                                                                               |       |
| 146.              | KPP Madya Tangerang         | Tangerang         | Madya        | Provinsi Banten                                                                                                                               |       |
| 147.              | KPP Pratama Serang Barat    | Kota Serang       | Pratama      | Kota Serang                                                                                                                                   |       |
| 148.              | KPP Pratama Serang Timur    | Kab. Serang       | Pratama      | Kab. Serang                                                                                                                                   |       |
| 149.              | KPP Pratama Tangerang Barat | Tangerang         | Pratama      | 1. Kec. Benda<br>2. Kec. Karawaci<br>3. Kec. Cibodas<br>4. Kec. Jatiuwung<br>5. Kec. Periuk<br>6. Kec. Neglasari                              |       |
| 150.              | KPP Pratama Tangerang Timur | Tangerang         | Pratama      | 1. Kec. Ciledug<br>2. Kec. Larangan<br>3. Kec. Karang Tengah<br>4. Kec. Cipondoh<br>5. Kec. Pinang<br>6. Kec. Tangerang<br>7. Kec. Batu Ceper |       |
| 151.              | KPP Pratama Serpong         | Serpong           | Pratama      | 1. Kec. Serpong<br>2. Kec. Serpong Utara<br>3. Kec. Setu                                                                                      |       |
| 152.              | KPP Pratama Pondok Aren     | Tangerang Selatan | Pratama      | 1. Kec. Pamulang<br>2. Kec. Ciputat<br>3. Kec. Ciputat Timur                                                                                  |       |



| NO   | NAMA                   | LOKASI     | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                                                                 |       |
|------|------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                        |            |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                        | KP2KP |
| 153. | KPP Pratama Cilegon    | Cilegon    | Pratama      | 4. Kec. Pondok Aren<br>Kota Cilegon                                                                                                                                                                                           |       |
| 154. | KPP Pratama Kosambi    | Tangerang  | Pratama      | 1. Kec. Pasar Kemis<br>2. Kec. Sindang Jaya<br>3. Kec. Rajeg<br>4. Kec. Mauk<br>5. Kec. Sukadiri<br>6. Kec. Pakuhaji<br>7. Kec. Sepatan<br>8. Kec. Sepatan Timur<br>9. Kec. Teluk Naga<br>10. Kec. Kosambi<br>11. Kec. Kemiri |       |
| 155. | KPP Pratama Pandeglang | Pandeglang | Pratama      | 1. Kab. Lebak<br>2. Kab. Pandeglang                                                                                                                                                                                           |       |
| 156. | KPP Pratama Tigaraksa  | Tangerang  | Pratama      | 1. Kec. Tigaraksa<br>2. Kec. Solear<br>3. Kec. Balaraja<br>4. Kec. Mekar Baru<br>5. Kec. Gunung Kaler<br>6. Kec. Kronjo<br>7. Kec. Kresek<br>8. Kec.                                                                          |       |

| NO                      | NAMA                             | LOKASI     | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                                                    |                |
|-------------------------|----------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                         |                                  |            |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                           | KP2KP          |
| 157.                    | KPP Pratama Cikupa               | Tangerang  | Pratama      | Sukamulya<br>9. Kec. Jayanti<br>10. Kec. Cisoka<br><br>1. Kec. Cikupa<br>2. Kec. Cisaug<br>3. Kec. Curug<br>4. Kec. Jambe<br>5. Kec. Kelapa<br>Dua<br>6. Kec. Legok<br>7. Kec.<br>Pagedangan<br>8. Kec. Panongan |                |
| Kanwil DJP Jawa Barat I |                                  |            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 158.                    | KPP Madya Bandung                | Bandung    | Madya        | Sebagian Provinsi<br>Jawa Barat                                                                                                                                                                                  | Pelabuhan Ratu |
| 159.                    | KPP Pratama<br>Sukabumi          | Sukabumi   | Pratama      | 1. Kab. Sukabumi<br>2. Kota Sukabumi                                                                                                                                                                             |                |
| 160.                    | KPP Pratama Cianjur              | Cianjur    | Pratama      | Kab. Cianjur                                                                                                                                                                                                     |                |
| 161.                    | KPP Pratama<br>Purwakarta        | Purwakarta | Pratama      | Kab. Purwakarta                                                                                                                                                                                                  |                |
| 162.                    | KPP Pratama Cimahi               | Cimahi     | Pratama      | 1. Kota Cimahi<br>2. Kab. Bandung<br>Barat                                                                                                                                                                       |                |
| 163.                    | KPP Pratama<br>Bandung Tegallega | Bandung    | Pratama      | 1. Kec. Astana<br>Anyar<br>2. Kec. Bojongloa<br>Kaler<br>3. Kec. Babakan<br>Ciparay<br>4. Kec. Bojongloa                                                                                                         |                |

| NO   | NAMA                           | LOKASI  | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                      |       |
|------|--------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                |         |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                                                   | KP2KP |
| 164. | KPP Pratama Bandung Cibeunying | Bandung | Pratama   | Kidul<br>5. Kec. Bandung Kulon<br><br>1. Kec. Cibeunying Kaler<br>2. Kec. Cidadak<br>3. Kec. Coblong<br>4. Kec. Sumur Bandung<br>5. Kec. Bandung Wetan<br>6. Kec. Cibeunying Kidul |       |
| 165. | KPP Pratama Bandung Karees     | Bandung | Pratama   | 1. Kec. Regol<br>2. Kec. Lengkong<br>3. Kec. Bandung Kidul<br>4. Kec. Batununggal<br>5. Kec. Kiaracondong                                                                          |       |
| 166. | KPP Pratama Bandung Bojonagara | Bandung | Pratama   | 1. Kec. Andir<br>2. Kec. Cicendo<br>3. Kec. Sukasari<br>4. Kec. Sukajadi                                                                                                           |       |
| 167. | KPP Pratama Bandung Cicadas    | Bandung | Pratama   | 1. Kec. Arcamanik<br>2. Kec. Cibiru<br>3. Kec. Antapani<br>4. Kec. Ujungberung                                                                                                     |       |

| NO   | NAMA                       | LOKASI      | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |                            |             |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                                      | KP2KP  |
| 168. | KPP Pratama<br>Tasikmalaya | Tasikmalaya | Pratama      | 5. Kec. Cinambo<br>6. Kec. Rancasari<br>7. Kec. Buahbatu<br>8. Kec.<br>Mandalajati<br>9. Kec. Gedebage<br>10. Kec.<br>Penyileukan<br>1. Kab.<br>Tasikmalaya<br>2. Kota<br>Tasikmalaya                                                                       | Banjar |
| 169. | KPP Pratama Ciamis         | Ciamis      | Pratama      | 1. Kab. Ciamis<br>2. Kab.<br>Pangandaran<br>3. Kota Banjar                                                                                                                                                                                                  |        |
| 170. | KPP Pratama Garut          | Garut       | Pratama      | Kab. Garut                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 171. | KPP Pratama Majalaya       | Majalaya    | Pratama      | 1. Kec. Majalaya<br>2. Kec. Cimenyan<br>3. Kec.<br>Cilengkrang<br>4. Kec. Cileunyi<br>5. Kec.<br>Bojongsoang<br>6. Kec.<br>Rancaekek<br>7. Kec. Ciparay<br>8. Kec.<br>Solokanjeruk<br>9. Kec. Kertasari<br>10. Kec. Paseh<br>11. Kec. Cikancung<br>12. Kec. |        |

| NO                       | NAMA                 | LOKASI   | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|--------------------------|----------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                          |                      |          |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KP2KP |
| 172.                     | KPP Pratama Soreang  | Soreang  | Pratama      | Cicalengka<br>13. Kec. Nagreg<br>14. Kec. Pacet<br>15. Kec. Ibum<br>1. Kec. Soreang<br>2. Kec. Margaasih<br>3. Kec.<br>Margahayu<br>4. Kec.<br>Dayeuhkolot<br>5. Kec. Katapang<br>6. Kec.<br>Baleendah<br>7. Kec.<br>Pameungpeuk<br>8. Kec. Arjasari<br>9. Kec. Banjaran<br>10. Kec. Cimaung<br>11. Kec.<br>Pangalengan<br>12. Kec.<br>Pasirjambu<br>13. Kec. Rancabali<br>14. Kec. Ciwidey<br>15. Kec.<br>Cangkuang<br>16. Kec.<br>Kutawaringin<br>Kab. Sumedang |       |
| 173.                     | KPP Pratama Sumedang | Sumedang | Pratama      | Kab. Sumedang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Kanwil DJP Jawa Barat II |                      |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 174.                     | KPP Madya Bekasi     | Bekasi   | Madya        | Sebagian Provinsi Jawa Barat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

| NO   | NAMA                            | LOKASI   | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                             |       |
|------|---------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                 |          |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                                    | KP2KP |
| 175. | KPP Pratama<br>Cikarang Selatan | Cikarang | Pratama      | 1. Kec. Cikarang Selatan<br>2. Kec. Cikarang Pusat<br>3. Kec. Cibarusah<br>4. Kec. Bojongmangu<br>5. Kec. Cikarang Barat<br>6. Kec. Serang Baru<br>7. Kec. Setu                           |       |
| 176. | KPP Pratama<br>Cikarang Utara   | Cikarang | Pratama      | 1. Kec. Cikarang Timur<br>2. Kec. Cikarang Utara<br>3. Kec. Kedungwaringin<br>4. Kec. Karangbahagia<br>5. Kec. Sukatani<br>6. Kec. Sukakarya<br>7. Kec. Pebayuran<br>8. Kec. Cabangbungin |       |
| 177. | KPP Pratama Cibitung            | Cibitung | Pratama      | 1. Kec. Cibitung<br>2. Kec. Tambun Selatan<br>3. Kec. Tambun Utara<br>4. Kec. Tarunajaya<br>5. Kec. Babelan                                                                               |       |

| NO   | NAMA                         | LOKASI   | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|------|------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                              |          |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KP2KP |
| 178. | KPP Pratama Karawang Utara   | Karawang | Pratama   | 6. Kec. Sukawangi<br>7. Kec. Muaragembong<br>8. Kec. Tambelang<br>1. Kec. Pakis Jaya<br>2. Kec. Batujaya<br>3. Kec. Tirtajaya<br>4. Kec. Cibuaya<br>5. Kec. Pedes<br>6. Kec. Cilebar<br>7. Kec. Jayakarta<br>8. Kec. Rengasdengklok<br>9. Kec. Kutawaluya<br>10. Kec. Rawa Merta<br>11. Kec. Karawang Barat<br>12. Kec. Karawang Timur<br>13. Kec. Teluk Jambe Barat<br>14. Kec. Teluk Jambe Timur<br>15. Kec. Majalaya |       |
| 179. | KPP Pratama Karawang Selatan | Karawang | Pratama   | 1. Kec. Tempuran<br>2. Kec. Cilamaya Kulon<br>3. Kec. Cilamaya Wetan<br>4. Kec. Talagasari<br>5. Kec. Lemahabang<br>6. Kec. Banyusari<br>7. Kec. Klari                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

| NO                        | NAMA                     | LOKASI       | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                               |       |
|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                           |                          |              |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                                            | KP2KP |
| 180.                      | KPP Pratama Subang       | Subang       | Pratama   | 8. Kec. Tirtamulya                                                                                                                                                          |       |
| 181.                      | KPP Pratama Indramayu    | Indramayu    | Pratama   | 9. Kec. Jatisari<br>10.Kec. Kotabaru<br>11.Kec. Ciampel<br>12.Kec. Cikampek<br>13.Kec. Pangkalan<br>14.Kec. Tegalwaru<br>15.Kec. Purwasari<br>Kab. Subang<br>Kab. Indramayu |       |
| 182.                      | KPP Pratama Cirebon Satu | Kota Cirebon | Pratama   | Kota Cirebon                                                                                                                                                                |       |
| 183.                      | KPP Pratama Cirebon Dua  | Kab.Cirebon  | Pratama   | Kab. Cirebon                                                                                                                                                                |       |
| 184.                      | KPP Pratama Kuningan     | Kuningan     | Pratama   | 1. Kab. Kuningan<br>2. Kab. Majalengka                                                                                                                                      |       |
| Majalengka                |                          |              |           |                                                                                                                                                                             |       |
| Kanwil DJP Jawa Barat III |                          |              |           |                                                                                                                                                                             |       |
| 185.                      | KPP Madya Bogor          | Bogor        | Madya     | Sebagian Provinsi Jawa Barat                                                                                                                                                |       |
| 186.                      | KPP Pratama Pondok Gede  | Bekasi       | Pratama   | 1. Kec. Pondok Gede<br>2. Kec. Jati Sampurna<br>3. Kec. Jatiasih<br>4. Kec. Pondok Melati                                                                                   |       |
| 187.                      | KPP Pratama Bekasi Barat | Bekasi       | Pratama   | 1. Kec. Medan Satria<br>2. Kec. Bekasi Barat                                                                                                                                |       |
| 188.                      | KPP Pratama Bekasi       | Bekasi       | Pratama   | 1. Kec. Bekasi                                                                                                                                                              |       |



| NO   | NAMA                        | LOKASI | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                         |       |
|------|-----------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                             |        |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                | KP2KP |
| 189. | Selatan                     | Bekasi | Pratama      | Selatan                                                                                                                                               |       |
|      | KPP Pratama Bekasi Utara    |        |              | 2. Kec. Bantar Gebang<br>3. Kec. Rawa Lumbu<br>4. Kec. Mustikajaya<br>1. Kec. Bekasi Timur<br>2. Kec. Bekasi Utara                                    |       |
| 190. | KPP Pratama Depok Sawangan  | Depok  | Pratama      | 1. Kec. Sawangan<br>2. Kec. Bojongsari<br>3. Kec. Pancoran Mas<br>4. Kec. Beji<br>5. Kec. Limo<br>6. Kec. Cinere                                      |       |
| 191. | KPP Pratama Depok Cimanggis | Depok  | Pratama      | 1. Kec. Cimanggis<br>2. Kec. Tapos<br>3. Kec. Cilodong<br>4. Kec. Sukmajaya<br>5. Kec. Cipayung                                                       |       |
| 192. | KPP Pratama Cibinong        | Bogor  | Pratama      | 1. Kec. Cibinong<br>2. Kec. Bojong Gede<br>3. Kec. Gunung Sindur<br>4. Kec. Kemang<br>5. Kec. Parung<br>6. Kec. Tajurhalang<br>7. Kec. Babakan Madang |       |

| NO   | NAMA                  | LOKASI | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|------|-----------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                       |        |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KP2KP |
| 193. | KPP Pratama Ciawi     | Bogor  | Pratama      | 8. Kec. Sukaraja<br>9. Kec. Gunung Putri<br>1. Kec. Ciawi<br>2. Kec. Caringin<br>3. Kec. Ciampea<br>4. Kec. Cibungbulang<br>5. Kec. Cigombong<br>6. Kec. Cigudeg<br>7. Kec. Cijeruk<br>8. Kec. Ciomas<br>9. Kec. Cisarua<br>10. Kec. Ciseeng<br>11. Kec. Dramaga<br>12. Kec. Jasinga<br>13. Kec. Leuwiliang<br>14. Kec. Leuwisadeng<br>15. Kec. Megamendung<br>16. Kec. Nanggung<br>17. Kec. Pamijahan<br>18. Kec. Parungpanjang<br>19. Kec. Rancabungur<br>20. Kec. Rumpin<br>21. Kec. Sukajaya<br>22. Kec. Tamansari<br>23. Kec. Tenjo<br>24. Kec. Tenjolaya |       |
| 194. | KPP Pratama Cileungsi | Bogor  | Pratama      | 1. Kec. Cileungsi<br>2. Kec. Cariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

| NO                       | NAMA                       | LOKASI     | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                        |         |
|--------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                          |                            |            |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                     | KP2KP   |
| 195.                     | KPP Pratama Bogor          | Bogor      | Pratama   | 3. Kec. Jonggol<br>4. Kec. Klapanunggal<br>5. Kec. Sukamakmur<br>6. Kec. Tanjungsari<br>7. Kec. Citeureup Kota Bogor |         |
| Kanwil DJP Jawa Tengah I |                            |            |           |                                                                                                                      |         |
| 196.                     | KPP Madya Semarang         | Semarang   | Madya     | Sebagian Provinsi Jawa Tengah                                                                                        | Bumiayu |
| 197.                     | KPP Pratama Tegal          | Tegal      | Pratama   | 1. Kab. Brebes<br>2. Kota Tegal<br>3. Kab. Tegal                                                                     |         |
| 198.                     | KPP Pratama Pekalongan     | Pekalongan | Pratama   | 1. Kab. Pekalongan<br>2. Kota Pekalongan<br>3. Kab. Pemalang                                                         |         |
| 199.                     | KPP Pratama Semarang Barat | Semarang   | Pratama   | 1. Kec. Semarang Barat<br>2. Kec. Ngaliyan<br>3. Kec. Tugu<br>4. Kec. Mijen<br>5. Kec. Gunung Pati                   |         |
| 200.                     | KPP Pratama Semarang Timur | Semarang   | Pratama   | 1. Kec. Semarang Timur<br>2. Kec. Semarang Utara                                                                     |         |
| 201.                     | KPP Pratama                | Semarang   | Pratama   | Kec. Semarang                                                                                                        |         |

| NO   | NAMA                                                       | LOKASI   | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                          |           |
|------|------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                            |          |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                                 | KP2KP     |
| 202. | Semarang Selatan<br>KPP Pratama<br>Semarang Tengah<br>Satu | Semarang | Pratama      | Selatan<br>1. Kel. Miroto<br>2. Kel. Jagalan<br>3. Kel.<br>Brumbungan<br>4. Kel.<br>Karangkidul<br>5. Kel. Pendrikan<br>Kidul<br>6. Kel. Pekunden<br>7. Kel. Sekayu                    |           |
| 203. | KPP Pratama<br>Semarang Tengah<br>Dua                      | Semarang | Pratama      | 1. Kel. Kranggan<br>2. Kel. Gabahan<br>3. Kel.<br>Kembangsari<br>4. Kel. Pandansari<br>5. Kel.<br>Bangunharjo<br>6. Kel. Kauman<br>7. Kel.<br>Purwodinatan<br>8. Kel. Pendrikan<br>Lor |           |
| 204. | KPP Pratama Salatiga                                       | Salatiga | Pratama      | 1. Kab. Semarang<br>2. Kota Salatiga                                                                                                                                                   | Ungaran   |
| 205. | KPP Pratama Kudus                                          | Kudus    | Pratama      | Kab. Kudus                                                                                                                                                                             | Rembang   |
| 206. | KPP Pratama Pati                                           | Pati     | Pratama      | 1. Kab. Rembang<br>2. Kab. Pati                                                                                                                                                        |           |
| 207. | KPP Pratama Batang                                         | Batang   | Pratama      | 1. Kab. Kendal<br>2. Kab. Batang                                                                                                                                                       | Kendal    |
| 208. | KPP Pratama Blora                                          | Blora    | Pratama      | 1. Kab. Grobogan<br>2. Kab. Blora                                                                                                                                                      | Purwodadi |

| NO                        | NAMA                           | LOKASI      | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                         |              |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                           |                                |             |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                      | KP2KP        |
| 209.                      | KPP Pratama Demak              | Demak       | Pratama   | Kab. Demak                                                                            |              |
| 210.                      | KPP Pratama Jepara             | Jepara      | Pratama   | Kab. Jepara                                                                           |              |
| 211.                      | KPP Pratama Semarang Candisari | Semarang    | Pratama   | 1. Kec. Gajah Mungkur<br>2. Kec. Candisari<br>3. Kec. Tembalang<br>4. Kec. Banyumanik |              |
| 212.                      | KPP Pratama Semarang Gayamsari | Semarang    | Pratama   | 1. Kec. Gayamsari<br>2. Kec. Genuk<br>3. Kec. Pedurungan                              |              |
| Kanwil DJP Jawa Tengah II |                                |             |           |                                                                                       |              |
| 213.                      | KPP Pratama Purwokerto         | Purwokerto  | Pratama   | Kab. Banyumas                                                                         | Majenang     |
| 214.                      | KPP Pratama Cilacap            | Cilacap     | Pratama   | Kab. Cilacap                                                                          |              |
| 215.                      | KPP Pratama Kebumen            | Kebumen     | Pratama   | Kab. Kebumen                                                                          |              |
| 216.                      | KPP Pratama Magelang           | Magelang    | Pratama   | 1. Kab. Magelang<br>2. Kota Magelang                                                  | Muntilan     |
| 217.                      | KPP Pratama Klaten             | Klaten      | Pratama   | Kab. Klaten                                                                           | Sragen       |
| 218.                      | KPP Pratama Surakarta          | Surakarta   | Pratama   | Kota Surakarta                                                                        |              |
| 219.                      | KPP Pratama Boyolali           | Boyolali    | Pratama   | Kab. Boyolali                                                                         |              |
| 220.                      | KPP Pratama Karanganyar        | Karanganyar | Pratama   | 1. Kab. Sragen<br>2. Kab. Karanganyar                                                 | Banjarnegara |
| 221.                      | KPP Pratama Purbalingga        | Purbalingga | Pratama   | 1. Kab. Banjarnegara<br>2. Kab. Purbalingga                                           |              |
| 222.                      | KPP Pratama Purworejo          | Purworejo   | Pratama   | Kab. Purworejo                                                                        |              |

| NO                       | NAMA                                       | LOKASI     | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                              |          |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                          |                                            |            |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                     | KP2KP    |
| 223.                     | Purworejo<br>KPP Pratama<br>Sukoharjo      | Sukoharjo  | Pratama      | 1. Kab. Wonogiri<br>2. Kab. Sukoharjo                                                                                      | Wonogiri |
| 224.                     | KPP Pratama<br>Temanggung                  | Temanggung | Pratama      | 1. Kab. Wonosobo<br>2. Kab.<br>Temanggung                                                                                  | Wonosobo |
| Kanwil DJP DI Yogyakarta |                                            |            |              |                                                                                                                            |          |
| 225.                     | KPP Pratama<br>Yogyakarta                  | Yogyakarta | Pratama      | Kota Yogyakarta                                                                                                            |          |
| 226.                     | KPP Pratama Bantul                         | Bantul     | Pratama      | Kab. Bantul                                                                                                                |          |
| 227.                     | KPP Pratama Sleman                         | Sleman     | Pratama      | Kab. Sleman                                                                                                                |          |
| 228.                     | KPP Pratama Wates                          | Wates      | Pratama      | Kab. Kulon Progo                                                                                                           |          |
| 229.                     | KPP Pratama<br>Wonosari                    | Wonosari   | Pratama      | Kab. Gunung<br>Kidul                                                                                                       |          |
| Kanwil DJP Jawa Timur I  |                                            |            |              |                                                                                                                            |          |
| 230.                     | KPP Madya Surabaya                         | Surabaya   | Madya        | Sebagian Provinsi<br>Jawa Timur                                                                                            |          |
| 231.                     | KPP Pratama<br>Surabaya<br>Sukomanunggal   | Surabaya   | Pratama      | 1. Kec.<br>Sukomanunggal<br>2. Kec. Tandes<br>3. Kec. Benowo<br>4. Kec. Lakarsantri<br>5. Kec. Pakal<br>6. Kec. Sambikerep |          |
| 232.                     | KPP Pratama<br>Surabaya<br>Krembangan      | Surabaya   | Pratama      | Kec. Krembangan                                                                                                            |          |
| 233.                     | KPP Pratama<br>Surabaya Pabean<br>Cantikan | Surabaya   | Pratama      | Kec. Pabean<br>Cantikan                                                                                                    |          |
| 234.                     | KPP Pratama                                | Surabaya   | Pratama      | 1. Kec. Gubeng                                                                                                             |          |

| NO                       | NAMA                                 | LOKASI   | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                        |       |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                          |                                      |          |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                               | KP2KP |
| 235.                     | Surabaya Gubeng<br>KPP Pratama       | Surabaya | Pratama      | 2. Kec. Sukolilo<br>Kec. Tegalsari                                                   |       |
| 236.                     | Surabaya Tegalsari<br>KPP Pratama    | Surabaya | Pratama      | 1. Kec. Sawahan<br>2. Kec. Asemrowo<br>3. Kec. Bubutan                               |       |
| 237.                     | Surabaya Sawahan<br>KPP Pratama      | Surabaya | Pratama      | 1. Kec. Wonocolo<br>2. Kec.<br>Jambangan<br>3. Kec. Gayungan<br>4. Kec.<br>Wonokromo |       |
| 238.                     | Surabaya Wonocolo<br>KPP Pratama     | Surabaya | Pratama      | Kec. Genteng                                                                         |       |
| 239.                     | Surabaya Genteng<br>KPP Pratama      | Surabaya | Pratama      | 1. Kec. Simokerto<br>2. Kec. Semampir                                                |       |
| 240.                     | Surabaya Simokerto<br>KPP Pratama    | Surabaya | Pratama      | 1. Kec. Rungkut<br>2. Kec. Gunung<br>Anyar<br>3. Kec. Tenggilis<br>Mejoyo            |       |
| 241.                     | Surabaya Rungkut<br>KPP Pratama      | Surabaya | Pratama      | 1. Kec.<br>Karangpilang<br>2. Kec. Wiyung<br>3. Kec. Dukuh<br>Pakis                  |       |
| 242.                     | Surabaya Karangpilang<br>KPP Pratama | Surabaya | Pratama      | 1. Kec. Mulyorejo<br>2. Kec. Tambaksari<br>3. Kec. Kenjeran<br>4. Kec. Bulak         |       |
| Kanwil DJP Jawa Timur II |                                      |          |              |                                                                                      |       |
| 243.                     | KPP Madya Sidoarjo                   | Sidoarjo | Madya        | Sebagian Provinsi                                                                    |       |

| NO   | NAMA                            | LOKASI     | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                               |          |
|------|---------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                 |            |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                      | KP2KP    |
| 244. | KPP Pratama<br>Bojonegoro       | Bojonegoro | Pratama      | Jawa Timur<br>Kab. Bojonegoro                                                                                                                                               | Mojosari |
| 245. | KPP Pratama<br>Mojokerto        | Mojokerto  | Pratama      | 1. Kab. Mojokerto<br>2. Kota Mojokerto                                                                                                                                      |          |
| 246. | KPP Pratama<br>Jombang          | Jombang    | Pratama      | Kab. Jombang                                                                                                                                                                |          |
| 247. | KPP Pratama Sidoarjo<br>Barat   | Sidoarjo   | Pratama      | 1. Kec. Taman<br>2. Kec. Sukodono<br>3. Kec. Krian<br>4. Kec.<br>Balongbendo<br>5. Kec. Wonoayu<br>6. Kec. Tarik<br>7. Kec. Prambon<br>8. Kec. Tulangan<br>9. Kec. Krembung |          |
| 248. | KPP Pratama Sidoarjo<br>Selatan | Sidoarjo   | Pratama      | 1. Kec. Sidoarjo<br>2. Kec. Candi<br>3. Kec.<br>Tanggulangun<br>4. Kec. Porong<br>5. Kec. Jabon                                                                             | Sumenep  |
| 249. | KPP Pratama Sidoarjo<br>Utara   | Sidoarjo   | Pratama      | 1. Kec. Waru<br>2. Kec. Sedati<br>3. Kec. Gedangan<br>4. Kec. Buduran                                                                                                       |          |
| 250. | KPP Pratama<br>Pamekasan        | Pamekasan  | Pratama      | 1. Kab. Sumenep<br>2. Kab.<br>Pamekasan                                                                                                                                     |          |
| 251. | KPP Pratama Gresik<br>Utara     | Gresik     | Pratama      | 1. Kec. Gresik<br>2. Kec. Manyar                                                                                                                                            |          |



| NO   | NAMA                       | LOKASI    | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |                            |           |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KP2KP   |
| 252. | KPP Pratama Gresik Selatan | Gresik    | Pratama   | 3. Kec. Kebomas<br>4. Kec. Duduk Sampeyan<br>5. Kec. Bungah<br>6. Kec. Sidayu<br>7. Kec. Panceng<br>8. Kec. Ujung Pangkah<br>9. Kec. Sangkapura<br>10. Kec. Tambak<br>11. Kec. Dukun<br>1. Kec. Wringin Anom<br>2. Kec. Driyorejo<br>3. Kec. Kedamean<br>4. Kec. Balongpanggang<br>5. Kec. Menganti<br>6. Kec. Benjeng<br>7. Kec. Cerme |         |
| 253. | KPP Pratama Madiun         | Madiun    | Pratama   | 1. Kab. Madiun<br>2. Kota Madiun                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Caruban |
| 254. | KPP Pratama Bangkalan      | Bangkalan | Pratama   | 1. Kab. Sampang<br>2. Kab. Bangkalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sampang |
| 255. | KPP Pratama Lamongan       | Lamongan  | Pratama   | Kab. Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 256. | KPP Pratama Ngawi          | Ngawi     | Pratama   | 1. Kab. Magetan<br>2. Kab. Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Magetan |
| 257. | KPP Pratama Tuban          | Tuban     | Pratama   | Kab. Tuban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 258. | KPP Pratama Ponorogo       | Ponorogo  | Pratama   | 1. Kab. Pacitan<br>2. Kab. Ponorogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pacitan |

| NO                        | NAMA                          | LOKASI      | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                     |                                          |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                           |                               |             |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                            | KP2KP                                    |
| Kanwil DJP Jawa Timur III |                               |             |              |                                                                                   |                                          |
| 259.                      | KPP Madya Malang              | Malang      | Madya        | Sebagian Provinsi<br>Jawa Timur                                                   |                                          |
| 260.                      | KPP Pratama Kediri            | Kediri      | Pratama      | Kota Kediri                                                                       | Bangil<br><br>1. Kraksaan<br>2. Lumajang |
| 261.                      | KPP Pratama Malang<br>Selatan | Malang      | Pratama      | 1. Kec. Klojen<br>2. Kec. Sukun<br>3. Kec.<br>Kedungkadang                        |                                          |
| 262.                      | KPP Pratama Malang<br>Utara   | Malang      | Pratama      | 1. Kec. Lowokwaru<br>2. Kec. Blimbing                                             |                                          |
| 263.                      | KPP Pratama Batu              | Batu        | Pratama      | Kota Batu                                                                         |                                          |
| 264.                      | KPP Pratama<br>Pasuruan       | Pasuruan    | Pratama      | 1. Kab. Pasuruan<br>2. Kota Pasuruan                                              |                                          |
| 265.                      | KPP Pratama<br>Probolinggo    | Probolinggo | Pratama      | 1. Kab.<br>Probolinggo<br>2. Kab. Lumajang<br>3. Kota<br>Probolinggo              |                                          |
| 266.                      | KPP Pratama Jember            | Jember      | Pratama      | Kab. Jember                                                                       |                                          |
| 267.                      | KPP Pratama<br>Banyuwangi     | Banyuwangi  | Pratama      | Kab. Banyuwangi                                                                   |                                          |
| 268.                      | KPP Pratama<br>Tulungagung    | Tulungagung | Pratama      | 1. Kab. Trenggalek<br>2. Kab.<br>Tulungagung                                      | Trenggalek                               |
| 269.                      | KPP Pratama Blitar            | Blitar      | Pratama      | 1. Kab. Blitar<br>2. Kota Blitar                                                  | Wlingi                                   |
| 270.                      | KPP Pratama<br>Kepanjen       | Blitar      | Pratama      | 1. Kec.<br>Bululawang<br>2. Kec. Wajak<br>3. Kec. Turen<br>4. Kec.<br>Gondanglegi |                                          |

| NO   | NAMA                     | LOKASI    | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                          |           |
|------|--------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|-----------|
|      |                          |           |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | KP2KP     |
| 271. | KPP Pratama Pare         | Kediri    | Pratama      | 5. Kec. Dampit                         | Nganjuk   |
|      |                          |           |              | 6. Kec. Tirtoyudo                      |           |
|      |                          |           |              | 7. Kec. Sumber<br>Manjing Wetan        |           |
|      |                          |           |              | 8. Kec. Ampel<br>Gading                |           |
|      |                          |           |              | 9. Kec. Gedangan                       |           |
|      |                          |           |              | 10. Kec. Bantur                        |           |
|      |                          |           |              | 11. Kec. Pagak                         |           |
|      |                          |           |              | 12. Kec. Pagelaran                     |           |
|      |                          |           |              | 13. Kec.<br>Donomulyo                  |           |
|      |                          |           |              | 14. Kec. Kalipare                      |           |
|      |                          |           |              | 15. Kec. Sumber<br>Pucung              |           |
|      |                          |           |              | 16. Kec.<br>Kromengan                  |           |
|      |                          |           |              | 17. Kec. Ngajum                        |           |
|      |                          |           |              | 18. Kec. Wonosari                      |           |
|      |                          |           |              | 19. Kec. Kepanjen                      |           |
|      |                          |           |              | 20. Kec. Pakisaji                      |           |
|      |                          |           |              | 21. Kec. Wagir                         |           |
|      |                          |           |              | 1. Kab. Nganjuk                        |           |
|      |                          |           |              | 2. Kab. Kediri                         |           |
|      |                          |           |              | 1. Kab.<br>Bondowoso                   | Bondowoso |
|      |                          |           |              | 2. Kab. Situbondo                      |           |
| 272. | KPP Pratama<br>Situbondo | Situbondo | Pratama      | 1. Kab.                                | Bondowoso |
|      |                          |           |              | 2. Kab. Situbondo                      |           |
| 273. | KPP Pratama<br>Singosari | Singosari | Pratama      | 1. Kec. Tumpang                        |           |
|      |                          |           |              | 2. Kec.<br>Poncokusumo                 |           |
|      |                          |           |              | 3. Kec. Jabung                         |           |

| NO                          | NAMA                           | LOKASI     | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                    |                            |
|-----------------------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                             |                                |            |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                           | KP2KP                      |
|                             |                                |            |              | 4. Kec. Lawang<br>5. Kec. Singosari<br><br>6. Kec.<br>Karangploso<br>7. Kec. Dau<br>8. Kec. Ngantang<br>9. Kec. Kasembon<br>10. Kec. Pakis<br>11. Kec. Tajinan<br>12. Kec. Pujon |                            |
| Kanwil DJP Kalimantan Barat |                                |            |              |                                                                                                                                                                                  |                            |
| 274.                        | KPP Pratama<br>Pontianak Barat | Pontianak  | Pratama      | 1. Kec. Pontianak<br>Kota<br>2. Kec. Pontianak<br>Barat                                                                                                                          |                            |
| 275.                        | KPP Pratama<br>Pontianak Timur | Pontianak  | Pratama      | 1. Kec. Pontianak<br>Selatan<br>2. Kec. Pontianak<br>Tenggara<br>3. Kec. Pontianak<br>Timur<br>4. Kec. Pontianak<br>Utara                                                        |                            |
| 276.                        | KPP Pratama<br>Singkawang      | Singkawang | Pratama      | 1. Kab.<br>Bengkayang<br>2. Kab. Sambas<br>3. Kota<br>Singkawang                                                                                                                 | 1. Bengkayang<br>2. Sambas |
| 277.                        | KPP Pratama<br>Ketapang        | Ketapang   | Pratama      | 1. Kab. Ketapang<br>2. Kab. Kayong<br>Utara                                                                                                                                      |                            |

| NO                                       | NAMA                     | LOKASI       | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                        |                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                          |                          |              |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                     | KP2KP                                                |
| 278.                                     | KPP Pratama Mempawah     | Pontianak    | Pratama   | 1. Kab.Mempawah<br>2. Kab. Kubu Raya                                                 | Mempawah                                             |
| 279.                                     | KPP Pratama Sanggau      | Sanggau      | Pratama   | 1. Kab. Landak<br>2. Kab. Sekadau<br>3. Kab. Sanggau                                 | 1. Ngabang<br>2. Sekadau                             |
| 280.                                     | KPP Pratama Sintang      | Sintang      | Pratama   | 1. Kab. Kapuas Hulu<br>2. Kab. Melawi<br>3. Kab. Sintang                             | 1. Putussibau<br>2. Nangapinoh                       |
| Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |                          |              |           |                                                                                      |                                                      |
| 281.                                     | KPP Pratama Palangkaraya | Palangkaraya | Pratama   | 1. Kab. Gunung Mas<br>2. Kab. Kapuas<br>3. Kab. Pulang Pisau<br>4. Kota Palangkaraya | 1. Kuala Kurun<br>2. Kuala Kapuas<br>3. Pulang Pisau |
| 282.                                     | KPP Pratama Sampit       | Sampit       | Pratama   | 1. Kab. Katingan<br>2. Kab. Seruyan<br>3. Kab. Kotawaringin Timur                    | 1. Kasongan<br>2. Kuala Pembuang                     |
| 283.                                     | KPP Pratama Pangkalanbun | Pangkalanbun | Pratama   | 1. Kab. Lamandau<br>2. Kab. Sukamara<br>3. Kab. Kotawaringin Barat                   | 1. Nanga Bulik<br>2. Sukamara                        |
| 284.                                     | KPP Pratama Muara Teweh  | Muara Teweh  | Pratama   | 1. Kab. Barito Selatan<br>2. Kab. Barito Timur<br>3. Kab. Murung                     | 1. Buntok<br>2. Tamiang Layang<br>3. Puruk Cahu      |

| NO   | NAMA                               | LOKASI      | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                   |                              |
|------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                    |             |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                          | KP2KP                        |
|      |                                    |             |              | Raya<br>4. Kab. Barito<br>Utara                                                                 |                              |
| 285. | KPP Pratama<br>Banjarmasin Selatan | Banjarmasin | Pratama      | 1. Kec. Banjarmasin<br>Tengah<br>2. Kec. Banjarmasin<br>Selatan<br>3. Kec. Banjarmasin<br>Timur |                              |
| 286. | KPP Pratama<br>Banjarmasin Utara   | Banjarmasin | Pratama      | 1. Kab. Barito<br>Kuala<br>2. Kec.<br>Banjarmasin<br>Barat<br>3. Kec.<br>Banjarmasin<br>Utara   | Marabahan                    |
| 287. | KPP Pratama<br>Banjarbaru          | Banjarbaru  | Pratama      | 1. Kab. Tanah<br>Laut<br>2. Kab. Banjar<br>3. Kota<br>Banjarbaru                                | 1. Pelaihari<br>2. Martapura |
| 288. | KPP Pratama Barabai                | Barabai     | Pratama      | 1. Kab. Tapin<br>2. Kab. Hulu<br>Sungai Selatan<br>3. Kab. Hulu<br>Sungai Tengah                | 1. Rantau<br>2. Kandungan    |
| 289. | KPP Pratama<br>Batulicin           | Batulicin   | Pratama      | 1. Kab. Kotabaru<br>2. Kab. Tanah<br>Bumbu                                                      | Kotabaru                     |
| 290. | KPP Pratama Tanjung                | Tanjung     | Pratama      | 1. Kab. Balangan<br>2. Kab. Hulu                                                                | 1. Paringin<br>2. Amuntai    |

| NO                                    | NAMA                         | LOKASI     | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                            |       |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                       |                              |            |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                         | KP2KP |
|                                       |                              |            |           | Sungai Utara<br>3. Kab.Tabalong                                                                                          |       |
| Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |                              |            |           |                                                                                                                          |       |
| 291.                                  | KPP Madya Balikpapan         | Balikpapan | Madya     | Provinsi Kalimantan Timur                                                                                                |       |
| 292.                                  | KPP Pratama Balikpapan Barat | Balikpapan | Pratama   | 1. Kec. Balikpapan Kota<br>2. Kec. Balikpapan Tengah<br>3. Kec. Balikpapan Barat                                         |       |
| 293.                                  | KPP Pratama Balikpapan Timur | Balikpapan | Pratama   | 1. Kec. Balikpapan Selatan<br>2. Kec. Balikpapan Timur<br>3. Kec. Balikpapan Utara                                       |       |
| 294.                                  | KPP Pratama Samarinda Ilir   | Samarinda  | Pratama   | 1. Kec. Samarinda Ilir<br>2. Kec. Samarinda Kota<br>3. Kec. Samarinda Utara<br>4. Kec. Sungai Pinang<br>5. Kec. Sambutan |       |
| 295.                                  | KPP Pratama                  | Samarinda  | Pratama   | 1. Kec. Samarinda                                                                                                        |       |

| NO                                               | NAMA                      | LOKASI        | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                          |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|                                                  |                           |               |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | KP2KP            |
|                                                  | Samarinda Ulu             |               |              | Ulu                                    |                  |
|                                                  |                           |               |              | 2. Kec. Samarinda Seberang             |                  |
|                                                  |                           |               |              | 3. Kec. Sungai Kunjang                 |                  |
|                                                  |                           |               |              | 4. Kec. Loa Janan Ilir                 |                  |
|                                                  |                           |               |              | 5. Kec. Palaran                        |                  |
| 296.                                             | KPP Pratama Tarakan       | Tarakan       | Pratama      | 1. Kab. Nunukan                        | Nunukan          |
|                                                  |                           |               |              | 2. Kota Tarakan                        |                  |
| 297.                                             | KPP Pratama Bontang       | Bontang       | Pratama      | 1. Kab. Kutai Timur                    | Sanggatta        |
|                                                  |                           |               |              | 2. Kota Bontang                        |                  |
| 298.                                             | KPP Pratama Penajam       | Balikpapan    | Pratama      | 1. Kab. Paser                          | Tanah Grogot     |
|                                                  |                           |               |              | 2. Kab. Penajam Paser Utara            |                  |
| 299.                                             | KPP Pratama Tanjung Redeb | Tanjung Redeb | Pratama      | 1. Kab. Bulungan                       | 1. Tanjung Selor |
|                                                  |                           |               |              | 2. Kab. Malinau                        | 2. Malinau       |
|                                                  |                           |               |              | 3. Kab. Berau                          |                  |
|                                                  |                           |               |              | 4. Kab. Tana Tidung                    |                  |
| 300.                                             | KPP Pratama Tenggarong    | Tenggarong    | Pratama      | 1. Kab. Kutai Barat                    | Sendawar         |
|                                                  |                           |               |              | 2. Kab. Mahakam Ulu                    |                  |
|                                                  |                           |               |              | 3. Kab. Kutai Kartanegara              |                  |
| Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara |                           |               |              |                                        |                  |
| 301.                                             | KPP Madya Makassar        | Makassar      | Madya        | 1. Provinsi Sulawesi Selatan           |                  |
|                                                  |                           |               |              | 2. Provinsi Sulawesi Barat             |                  |



| NO   | NAMA                         | LOKASI   | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                           |                                        |
|------|------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      |                              |          |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                        | KP2KP                                  |
|      |                              |          |           | 3. Provinsi Sulawesi Tenggara                                                                                                                           |                                        |
| 302. | KPP Pratama Makassar Utara   | Makassar | Pratama   | 1. Kec. Wajo<br>2. Kec. Ujung Tanah<br>3. Kec. Kepulauan Sangkarrang<br>4. Kec. Tallo<br>5. Kec. Bontoala<br>6. Kec. Biringkanaya<br>7. Kec. Tamalanrea |                                        |
| 303. | KPP Pratama Makassar Barat   | Makassar | Pratama   | 1. Kec. Tamalate<br>2. Kec. Mamajang<br>3. Kec. Mariso<br>4. Kec. Ujung Pandang                                                                         |                                        |
| 304. | KPP Pratama Makassar Selatan | Makassar | Pratama   | 1. Kec. Panakkukang<br>2. Kec. Manggala<br>3. Kec. Rappocini<br>4. Kec. Makassar                                                                        |                                        |
| 305. | KPP Pratama Parepare         | Parepare | Pratama   | 1. Kab. Enrekang<br>2. Kab. Pinrang<br>3. Kab. Sidenreng Rappang<br>4. Kota Parepare<br>5. Kab. Barru                                                   | 1. Enrekang<br>2. Pinrang<br>3. Sidrap |
| 306. | KPP Pratama Palopo           | Palopo   | Pratama   | 1. Kab. Luwu Timur                                                                                                                                      | 1. Malili<br>2. Masamba                |

| NO   | NAMA                     | LOKASI    | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                      |                                                              |
|------|--------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                          |           |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                             | KP2KP                                                        |
| 307. | KPP Pratama<br>Bulukumba | Bulukumba | Pratama      | 2. Kab. Luwu<br>Utara<br>3. Kab. Tanatoraja<br>4. Kab. Toraja<br>Utara<br>5. Kota Palopo<br>6. Kab. Luwu<br>1. Kab. Kepulauan<br>Selayar<br>2. Kab. Sinjai<br>3. Kab.<br>Bulukumba | 3. Makale<br><br><br><br><br><br><br>1. Benteng<br>2. Sinjai |
| 308. | KPP Pratama<br>Bantaeng  | Bantaeng  | Pratama      | 1. Kab. Jeneponto<br>2. Kab. Gowa<br>3. Kab. Takalar<br>4. Kab. Bantaeng                                                                                                           | 1. Bontosung-<br>gu<br>2. Sunggumi-<br>nasa<br>3. Takalar    |
| 309. | KPP Pratama<br>Watampone | Watampone | Pratama      | 1. Kab. Soppeng<br>2. Kab. Wajo<br>3. Kab. Bone                                                                                                                                    | 1. Watansop-<br>peng<br>2. Sengkang                          |
| 310. | KPP Pratama Maros        | Maros     | Pratama      | 1. Kab.<br>Pangkajene<br>Kepulauan<br>2. Kab. Maros                                                                                                                                | Pangkajene                                                   |
| 311. | KPP Pratama Kendari      | Kendari   | Pratama      | 1. Kab. Konawe<br>2. Kab. Konawe<br>Kepulauan<br>3. Kota Kendari<br>4. Kab. Konawe<br>Selatan<br>5. Kab. Konawe<br>Utara                                                           | Unaaha                                                       |

| NO                                                             | NAMA               | LOKASI    | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                |                    |           |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                                  | KP2KP                    |
| 312.                                                           | KPP Pratama Majene | Majene    | Pratama   | 1. Kab. Polewali Mandar<br>2. Kab. Mamasa<br>3. Kab. Majene                                                                                                       | 1. Polewali<br>2. Mamasa |
| 313.                                                           | KPP Pratama Mamuju | Mamuju    | Pratama   | 1. Kab. Mamuju Utara<br>2. Kab. Mamuju<br>3. Kab. Mamuju Tengah                                                                                                   | Pasangkayu               |
| 314.                                                           | KPP Pratama Kolaka | Kolaka    | Pratama   | 1. Kab. Kolaka Utara<br>2. Kab. Bombana<br>3. Kab. Kolaka<br>4. Kab. Kolaka Timur                                                                                 | 1. Lasusua<br>2. Rumbia  |
| 315.                                                           | KPP Pratama Baubau | Baubau    | Pratama   | 1. Kab. Muna<br>2. Kab. Muna Barat<br>3. Kota Baubau<br>4. Kab. Buton<br>5. Kab. Buton Selatan<br>6. Kab. Buton Tengah<br>7. Kab. Buton Utara<br>8. Kab. Wakatobi | Raha                     |
| Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara |                    |           |           |                                                                                                                                                                   |                          |
| 316.                                                           | KPP Pratama Manado | Manado    | Pratama   | 1. Kota Tomohon<br>2. Kota Manado                                                                                                                                 | Tomohon                  |
| 317.                                                           | KPP Pratama        | Gorontalo | Pratama   | 1. Kab. Gorontalo                                                                                                                                                 | 1. Limboto               |

| NO   | NAMA                   | LOKASI     | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------|------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|      |                        |            |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                    | KP2KP                     |
| 318. | KPP Pratama Bitung     | Bitung     | Pratama   | 2. Kab. Pohuwatu<br>3. Kab. Boalemo<br>4. Kota Gorontalo<br>5. Kab. Gorontalo Utara<br>6. Kab. Bone Bolango                                                                                                         | 2. Marissa<br>3. Tilamuta |
|      |                        |            |           | 1. Kab. Minahasa<br>2. Kota Bitung<br>3. Kab. Minahasa Utara                                                                                                                                                        | Tondano                   |
| 319. | KPP Pratama Kotamobagu | Kotamobagu | Pratama   | 1. Kab. Minahasa Selatan<br>2. Kota Kotamobagu<br>3. Kab. Bolaang Mongondow<br>4. Kab. Bolaang Mongondow Utara<br>5. Kab. Bolaang Mongondow Selatan<br>6. Kab. Bolaang Mongondow Timur<br>7. Kab. Minahasa Tenggara | Amurang                   |
| 320. | KPP Pratama Tahuna     | Tahuna     | Pratama   | 1. Kab. Kepulauan Talaud<br>2. Kab. Kepulauan Sangihe                                                                                                                                                               | Talaud                    |

| NO   | NAMA                  | LOKASI    | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                |                                     |
|------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                       |           |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                       | KP2KP                               |
| 321. | KPP Pratama Palu      | Palu      | Pratama      | 3. Kab. Kepulauan<br>Siau<br>Tagulandang<br>Biaro<br>1. Kab. Donggala<br>2. Kab. Parigi<br>Moutong<br>3. Kota Palu<br>4. Kab. Sigi                           | 1. Banawa<br>2. Parigi              |
| 322. | KPP Pratama Luwuk     | Luwuk     | Pratama      | 1. Kab. Banggai<br>2. Kab. Banggai<br>Kepulauan<br>3. Kab. Banggai<br>Laut                                                                                   | Banggai                             |
| 323. | KPP Pratama Poso      | Poso      | Pratama      | 1. Kab. Morowali<br>2. Kab. Morowali<br>Utara<br>3. Kab. Poso<br>4. Kab. Tojo Una<br>Una                                                                     | Bungku                              |
| 324. | KPP Pratama Toli Toli | Toli Toli | Pratama      | 1. Kab. Buol<br>2. Kab. Toli Toli                                                                                                                            | Buol                                |
| 325. | KPP Pratama Ternate   | Ternate   | Pratama      | 1. Kab. Kepulauan<br>Sula<br>2. Kab. Pulau<br>Taliabu<br>3. Kota Tidore<br>Kepulauan<br>4. Kab. Halmahera<br>Selatan<br>5. Kota Ternate<br>6. Kab. Halmahera | 1. Sanana<br>2. Tidore<br>3. Labuha |

| NO              | NAMA                       | LOKASI    | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                    |           |
|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                 |                            |           |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                 | KP2KP     |
| 326.            | KPP Pratama Tobelo         | Tobelo    | Pratama   | Tengah<br>1. Kab. Halmahera Timur<br>2. Kab. Pulau Morotai<br>3. Kab. Halmahera Barat<br>4. Kab. Halmahera Utara | Maba      |
| Kanwil DJP Bali |                            |           |           |                                                                                                                  |           |
| 327.            | KPP Madya Denpasar         | Denpasar  | Madya     | Provinsi Bali                                                                                                    | Kerobokan |
| 328.            | KPP Pratama Denpasar Barat | Denpasar  | Pratama   | 1. Kec. Denpasar Barat<br>2. Kec. Denpasar Utara                                                                 |           |
| 329.            | KPP Pratama Denpasar Timur | Denpasar  | Pratama   | 1. Kec. Denpasar Timur<br>2. Kec. Denpasar Selatan                                                               |           |
| 330.            | KPP Pratama Singaraja      | Singaraja | Pratama   | Kab. Buleleng                                                                                                    |           |
| 331.            | KPP Pratama Badung Selatan | Kuta      | Pratama   | 1. Kec. Kuta<br>2. Kec. Kuta Selatan                                                                             |           |
| 332.            | KPP Pratama Badung Utara   | Denpasar  | Pratama   | 1. Kec. Kuta Utara<br>2. Kec. Mengwi<br>3. Kec. Abiansemal<br>4. Kec. Petang                                     |           |
| 333.            | KPP Pratama Gianyar        | Gianyar   | Pratama   | 1. Kab. Gianyar<br>2. Kab. Karang Asem                                                                           |           |

| NO                       | NAMA                      | LOKASI        | JENIS KPP | WILAYAH KERJA                                                                                |                       |
|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                          |                           |               |           | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                             | KP2KP                 |
| 334.                     | KPP Pratama Tabanan       | Tabanan       | Pratama   | 3. Kab. Bangli<br>4. Kab. Klungkung<br>1. Kab. Jembrana<br>2. Kab. Tabanan                   | Negara                |
| Kanwil DJP Nusa Tenggara |                           |               |           |                                                                                              |                       |
| 335.                     | KPP Pratama Mataram Barat | Mataram       | Pratama   | Kota Mataram                                                                                 | Gerung                |
| 336.                     | KPP Pratama Mataram Timur | Mataram       | Pratama   | 1. Kab. Lombok Barat<br>2. Kab. Lombok Utara                                                 |                       |
| 337.                     | KPP Pratama Raba Bima     | Raba Bima     | Pratama   | 1. Kab. Dompu<br>2. Kota Bima<br>3. Kab. Bima                                                | Dompu                 |
| 338.                     | KPP Pratama Sumbawa Besar | Sumbawa Besar | Pratama   | 1. Kab. Sumbawa Barat<br>2. Kab. Sumbawa                                                     | Taliwang              |
| 339.                     | KPP Pratama Praya         | Praya         | Pratama   | 1. Kab. Lombok Timur<br>2. Kab. Lombok Tengah                                                | Selong                |
| 340.                     | KPP Pratama Maumere       | Maumere       | Pratama   | 1. Kab. Flores Timur<br>2. Kab. Sikka<br>3. Kab. Lembata                                     | Larantuka             |
| 341.                     | KPP Pratama Kupang        | Kupang        | Pratama   | 1. Kab. Rote Ndao<br>2. Kab. Alor<br>3. Kota Kupang<br>4. Kab. Kupang<br>5. Kab. Sabu Raijua | 1. Baa<br>2. Kalabahi |

| NO                          | NAMA                 | LOKASI   | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                  |                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                      |          |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                         | KP2KP                                                                             |
| 342.                        | KPP Pratama Ende     | Ende     | Pratama      | 1. Kab. Ngada<br>2. Kab. Ende<br>3. Kab. Nagekeo                                               | Bajawa                                                                            |
| 343.                        | KPP Pratama Ruteng   | Ruteng   | Pratama      | 1. Kab. Manggarai Barat<br>2. Kab. Manggarai<br>3. Kab. Manggarai Timur                        | Labuan Bajo                                                                       |
| 344.                        | KPP Pratama Atambua  | Atambua  | Pratama      | 1. Kab. Timor Tengah Selatan<br>2. Kab. Belu<br>3. Kab. Malaka<br>4. Kab. Timor Tengah Utara   | Soe                                                                               |
| 345.                        | KPP Pratama Waingapu | Waingapu | Pratama      | 1. Kab. Sumba Barat<br>2. Kab. Sumba Timur<br>3. Kab. Sumba Tengah<br>4. Kab. Sumba Barat Daya | Waikabubak                                                                        |
| Kanwil DJP Papua dan Maluku |                      |          |              |                                                                                                |                                                                                   |
| 346.                        | KPP Pratama Ambon    | Ambon    | Pratama      | Provinsi Maluku                                                                                | 1. Namlea<br>2. Masohi<br>3. Piru<br>4. Bula<br>5. Dobo<br>6. Tual<br>7. Saumlaki |



| NO   | NAMA                 | LOKASI   | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|------|----------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                      |          |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                                  | KP2KP                                    |
| 347. | KPP Pratama Sorong   | Sorong   | Pratama      | 1. Kab. Fakfak<br>2. Kab. Sorong Selatan<br>3. Kab. Kaimana<br>4. Kota Sorong<br>5. Kab. Sorong<br>6. Kab. Tambrauw<br>7. Kab. Maybrat<br>8. Kab. Raja Ampat                                                                                            | 1. Fakfak<br>2. Teminabuan<br>3. Kaimana |
| 348. | KPP Pratama Jayapura | Jayapura | Pratama      | 1. Kab. Sarmi<br>2. Kab. Jayawijaya<br>3. Kota Jayapura<br>4. Kab. Jayapura<br>5. Kab. Keerom<br>6. Kab. Mamberamo Raya<br>7. Kab. Lanny Jaya<br>8. Kab. Nduga<br>9. Kab. Mamberamo Tengah<br>10. Kab. Yalimo<br>11. Kab. Tolikara<br>12. Kab. Yahukimo | 1. Sarmi<br>2. Wamena                    |

| NO   | NAMA                     | LOKASI    | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                   |                       |
|------|--------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                          |           |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                          | KP2KP                 |
| 349. | KPP Pratama Timika       | Timika    | Pratama      | 13. Kab. Puncak<br>Jaya<br>14. Kab. Puncak<br>15. Kab.<br>Pegunungan<br>Bintang<br><br>1. Kab. Mimika<br>2. Kab. Paniai<br>3. Kab. Intan Jaya<br>4. Kab. Deiyai |                       |
| 350. | KPP Pratama Biak         | Biak      | Pratama      | 1. Kab. Kepulauan<br>Yapen<br>2. Kab. Waropen<br>3. Kab. Nabire<br>4. Kab. Biak<br>Numfor<br>5. Kab. Supiori<br>6. Kab. Dogiyai                                 | 1. Serui<br>2. Nabire |
| 351. | KPP Pratama<br>Manokwari | Manokwari | Pratama      | 1. Kab. Teluk<br>Bintuni<br>2. Kab. Manokwari<br>3. Kab. Manokwari<br>Selatan<br>4. Kab.<br>Pegunungan<br>Arafak<br>5. Kab. Teluk<br>Wondama                    | Bintuni               |

| NO   | NAMA                | LOKASI  | JENIS<br>KPP | WILAYAH KERJA                                                                |       |
|------|---------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                     |         |              | DAERAH<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                       | KP2KP |
| 352. | KPP Pratama Merauke | Merauke | Pratama      | 1. Kab. Merauke<br>2. Kab. Asmat<br>3. Kab. Boven<br>Digoel<br>4. Kab. Mappi |       |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA  
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN

| NO.                                  | NAMA                | LOKASI        | DAERAH ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kantor Wilayah DJP Aceh              |                     |               |                                                                                                           |
| 1.                                   | KP2KP Sigli         | Sigli         | Kab. Aceh Pidie                                                                                           |
| 2.                                   | KP2KP Sabang        | Sabang        | Kota Sabang                                                                                               |
| 3.                                   | KP2KP Lhoksukon     | Lhoksukon     | Kab. Aceh Utara                                                                                           |
| 4.                                   | KP2KP Calang        | Calang        | Kab. Aceh Jaya                                                                                            |
| 5.                                   | KP2KP Suka Makmur   | Suka Makmur   | Kab. Nagan Raya                                                                                           |
| 6.                                   | KP2KP Takengon      | Takengon      | Kab. Aceh Tengah                                                                                          |
| 7.                                   | KP2KP Rimba Raya    | Rimba Raya    | Kab. Bener Meriah                                                                                         |
| 8.                                   | KP2KP Karang Baru   | Karang Baru   | Kab. Aceh Tamiang                                                                                         |
| 9.                                   | KP2KP Blangkejeren  | Blangkejeren  | Kab. Gayo Lues                                                                                            |
| 10.                                  | KP2KP Blangpidie    | Blangpidie    | Kab. Aceh Barat Daya                                                                                      |
| 11.                                  | KP2KP Sinabang      | Sinabang      | Kab. Simeulue                                                                                             |
| 12.                                  | KP2KP Aceh Singkil  | Aceh Singkil  | Kab. Aceh Singkil                                                                                         |
| 13.                                  | KP2KP Kutacane      | Kutacane      | Kab. Aceh Tenggara                                                                                        |
| Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II |                     |               |                                                                                                           |
| 14.                                  | KP2KP Tanjung Balai | Tanjung Balai | Kota Tanjung Balai                                                                                        |
| 15.                                  | KP2KP Kualuh Hulu   | Kualuh Hulu   | Kab. Labuhanbatu Utara                                                                                    |
| 16.                                  | KP2KP Kota Pinang   | Kota Pinang   | Kab. Labuhanbatu Selatan                                                                                  |
| 17.                                  | KP2KP Perdagangan   | Perdagangan   | Kab. Simalungun                                                                                           |
| 18.                                  | KP2KP Panyabungan   | Panyabungan   | Kab. Mandailing Natal                                                                                     |
| 19.                                  | KP2KP Sibuhuan      | Sibuhuan      | Kab. Padang Lawas                                                                                         |
| 20.                                  | KP2KP Pandan        | Pandan        | Kab. Tapanuli Tengah                                                                                      |
| 21.                                  | KP2KP Gunungsitoli  | Gunungsitoli  | 1. Kab. Nias<br>2. Kab. Nias Selatan<br>3. Kab. Nias Utara<br>4. Kab. Nias Barat<br>5. Kota Gunung Sitoli |

| NO.                                         | NAMA                     | LOKASI             | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.                                         | KP2KP Dolok Sanggul      | Dolok Sanggul      | Kab. Humbang Hasundutan                                                                                                                                            |
| 23.                                         | KP2KP Tarutung           | Tarutung           | Kab. Tapanuli Utara                                                                                                                                                |
| 24.                                         | KP2KP Sidikalang         | Sidikalang         | Kab. Dairi                                                                                                                                                         |
| Kantor Wilayah DJP Riau                     |                          |                    |                                                                                                                                                                    |
| 25.                                         | KP2KP Bagansiapiapi      | Bagansiapiapi      | Kab. Rokan Hilir                                                                                                                                                   |
| 26.                                         | KP2KP Tembilahan         | Tembilahan         | Kab. Indragiri Hilir                                                                                                                                               |
| 27.                                         | KP2KP Teluk Kuantan      | Teluk Kuantan      | Kab. Kuantan Singingi                                                                                                                                              |
| 28.                                         | KP2KP Duri               | Duri               | Kab. Bengkalis:<br>1. Kec. Siak Kecil<br>2. Kec. Mandau<br>3. Kec. Pinggir                                                                                         |
| 29.                                         | KP2KP Selat Panjang      | Selat Panjang      | Kab. Kepulauan Meranti                                                                                                                                             |
| 30.                                         | KP2KP Pasir Pangarayan   | Pasir Pangarayan   | Kab. Rokan Hulu                                                                                                                                                    |
| 31.                                         | KP2KP Siak Sri Indrapura | Siak Sri Indrapura | Kab. Siak                                                                                                                                                          |
| Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau           |                          |                    |                                                                                                                                                                    |
| 32.                                         | KP2KP Ranai              | Ranai              | 1. Kab. Natuna<br>2. Kab. Kepulauan Anambas                                                                                                                        |
| 33.                                         | KP2KP Tanjung Batu       | Tanjung Batu       | Kab. Karimun:<br>1. Kec. Belat<br>2. Kec. Buru<br>3. Kec. Durai<br>4. Kec. Kundur<br>5. Kec. Kundur Barat<br>6. Kec. Kundur Utara<br>7. Kec. Moro<br>8. Kec. Ungar |
| 34.                                         | KP2KP Dabo Singkep       | Dabo Singkep       | Kab. Lingga                                                                                                                                                        |
| Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi |                          |                    |                                                                                                                                                                    |
| 35.                                         | KP2KP Pariaman           | Pariaman           | Kota Pariaman                                                                                                                                                      |
| 36.                                         | KP2KP Tua Pejat          | Tua Pejat          | Kab. Kepulauan Mentawai                                                                                                                                            |
| 37.                                         | KP2KP Painan             | Painan             | Kab. Pesisir Selatan                                                                                                                                               |
| 38.                                         | KP2KP Lubuk Basung       | Lubuk Basung       | Kab. Agam                                                                                                                                                          |

| NO.                                                               | NAMA                  | LOKASI          | DAERAH ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39.                                                               | KP2KP Lubuk Sikaping  | Lubuk Sikaping  | Kab. Pasaman                                                                                                                                                              |
| 40.                                                               | KP2KP Padang Panjang  | Padang Panjang  | Kota Padang Panjang                                                                                                                                                       |
| 41.                                                               | KP2KP Simpang Ampat   | Simpang Ampat   | Kab. Pasaman Barat                                                                                                                                                        |
| 42.                                                               | KP2KP Kotabaru        | Kotabaru        | Kab. Dharmas Raya                                                                                                                                                         |
| 43.                                                               | KP2KP Muaro Sijunjung | Muaro Sijunjung | Kab. Sijunjung                                                                                                                                                            |
| 44.                                                               | KP2KP Padang Aro      | Padang Aro      | Kab. Solok Selatan                                                                                                                                                        |
| 45.                                                               | KP2KP Sawahlunto      | Sawahlunto      | Kota Sawahlunto                                                                                                                                                           |
| 46.                                                               | KP2KP Batu Sangkar    | Batu Sangkar    | Kab. Tanah Datar                                                                                                                                                          |
| 47.                                                               | KP2KP Sengeti         | Sengeti         | Kab. Muaro Jambi                                                                                                                                                          |
| 48.                                                               | KP2KP Muara Bulian    | Muara Bulian    | Kab. Batang Hari                                                                                                                                                          |
| 49.                                                               | KP2KP Rimbo Bujang    | Rimbo Bujang    | Kab. Tebo:<br>1. Kec. Rimbo Bujang<br>2. Kec. Rimbo Ilir<br>3. Kec. Rimbo Ulu<br>4. Kec. Serai Serumpung<br>5. Kec. Tebo Ulu<br>6. Kec. VII Koto<br>7. Kec. VII Koto Ilir |
| 50.                                                               | KP2KP Muara Tebo      | Muara Tebo      | Kab. Tebo:<br>1. Kec. Muara Tabir<br>2. Kec. Sumay<br>3. Kec. Tebo Ilir<br>4. Kec. Tebo Tengah<br>5. Kec. Tengah Ilir                                                     |
| 51.                                                               | KP2KP Sungai Penuh    | Sungai Penuh    | 1. Kab. Kerinci<br>2. Kota Sungai Penuh                                                                                                                                   |
| 52.                                                               | KP2KP Sarolangun      | Sarolangun      | Kab. Sarolangun                                                                                                                                                           |
| 53.                                                               | KP2KP Muara Sabak     | Muara Sabak     | Kab. Tanjung Jabung Timur                                                                                                                                                 |
| Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung |                       |                 |                                                                                                                                                                           |
| 54.                                                               | KP2KP Muaradua        | Muaradua        | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan                                                                                                                                            |
| 55.                                                               | KP2KP Martapura       | Martapura       | Kab. Ogan Komering Ulu Timur                                                                                                                                              |
| 56.                                                               | KP2KP Tugumulyo       | Tugumulyo       | 1. Kab. Musi Rawas<br>2. Kab. Musi Rawas Utara                                                                                                                            |
| 57.                                                               | KP2KP Manggar         | Manggar         | Kab. Belitang Timur                                                                                                                                                       |

| NO.                                     | NAMA                  | LOKASI          | DAERAH ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58.                                     | KP2KP Pagar Alam      | Pagar Alam      | Kota Pagar Alam                                                                                                                                                                                                                |
| 59.                                     | KP2KP Tebingtinggi    | Empat Lawang    | Kab. Empat Lawang                                                                                                                                                                                                              |
| 60.                                     | KP2KP Indralaya       | Indralaya       | Kab. Ogan Ilir                                                                                                                                                                                                                 |
| 61.                                     | KP2KP Muara Enim      | Muara Enim      | 1. Kab. Muara Enim<br>2. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir                                                                                                                                                                       |
| 62.                                     | KP2KP Pangkalan Balai | Pangkalan Balai | Kab. Banyuasin                                                                                                                                                                                                                 |
| 63.                                     | KP2KP Muntok          | Muntok          | Kab. Bangka Barat                                                                                                                                                                                                              |
| 64.                                     | KP2KP Sungai Liat     | Sungai Liat     | Kab. Bangka:<br>1. Kec. Belinyu<br>2. Kec. Riau Silip<br>3. Kec. Sungailiat                                                                                                                                                    |
| 65.                                     | KP2KP Toboali         | Toboali         | Kab. Bangka Selatan                                                                                                                                                                                                            |
| 66.                                     | KP2KP Koba            | Koba            | Kab. Bangka Tengah:<br>1. Kec. Koba<br>2. Kec. Lubuk Besar<br>3. Kec. Namang<br>4. Kec. Pangkalan Baru                                                                                                                         |
| Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| 67.                                     | KP2KP Manna           | Manna           | Kab. Bengkulu Selatan                                                                                                                                                                                                          |
| 68.                                     | KP2KP Bintuhan        | Bintuhan        | Kab. Kaur                                                                                                                                                                                                                      |
| 69.                                     | KP2KP Bandarjaya      | Bandarjaya      | Kab. Lampung Tengah                                                                                                                                                                                                            |
| 70.                                     | KP2KP Sukadana        | Sukadana        | Kab. Lampung Timur                                                                                                                                                                                                             |
| 71.                                     | KP2KP Kalianda        | Kalianda        | Kab. Lampung Selatan:<br>1. Kec. Bakauheni<br>2. Kec. Candipuro<br>3. Kec. Kalianda<br>4. Kec. Ketapang<br>5. Kec. Palas<br>6. Kec. Penengahan<br>7. Kec. Rajabasa<br>8. Kec. Sragi<br>9. Kec. Sidomulyo<br>10. Kec. Way Panji |

| NO.                               | NAMA                   | LOKASI         | DAERAH ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72.                               | KP2KP Pringsewu        | Pringsewu      | 1. Kab. Pringsewu                                                                                                                                                       |
| 73.                               | KP2KP Liwa             | Liwa           | 2. Kab. Tanggamus<br>1. Kab. Lampung Barat                                                                                                                              |
| 74.                               | KP2KP Menggala         | Menggala       | 2. Kab. Pesisir Barat<br>1. Kab. Tulang Bawang                                                                                                                          |
| 75.                               | KP2KP Baradatu         | Baradatu       | 2. Kab. Tulang Bawang Barat<br>3. Kab. Mesuji                                                                                                                           |
| 76.                               | KP2KP Kepahiang        | Kepahiang      | Kab. Way Kanan                                                                                                                                                          |
| 77.                               | KP2KP Muko-Muko        | Mukomuko       | Kab. Kepahiang<br>Kab. Muko-Muko                                                                                                                                        |
| Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara  |                        |                |                                                                                                                                                                         |
| 78.                               | KP2KP Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka  | Kab. Kepulauan Seribu                                                                                                                                                   |
| Kantor Wilayah DJP Banten         |                        |                |                                                                                                                                                                         |
| 79.                               | KP2KP Rangkas Bitung   | Rangkas Bitung | Kab. Lebak                                                                                                                                                              |
| Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I   |                        |                |                                                                                                                                                                         |
| 80.                               | KP2KP Pelabuhan Ratu   | Pelabuhan Ratu | Kab. Sukabumi                                                                                                                                                           |
| 81.                               | KP2KP Banjar           | Banjar         | Kota Banjar                                                                                                                                                             |
| Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II  |                        |                |                                                                                                                                                                         |
| 82.                               | KP2KP Majalengka       | Majalengka     | Kab. Majalengka                                                                                                                                                         |
| Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I  |                        |                |                                                                                                                                                                         |
| 83.                               | KP2KP Bumiayu          | Bumiayu        | Kab. Brebes                                                                                                                                                             |
| 84.                               | KP2KP Ungaran          | Ungaran        | Kab. Semarang                                                                                                                                                           |
| 85.                               | KP2KP Rembang          | Rembang        | Kab. Rembang                                                                                                                                                            |
| 86.                               | KP2KP Kendal           | Kendal         | Kab. Kendal                                                                                                                                                             |
| 87.                               | KP2KP Purwodadi        | Purwodadi      | Kab. Grobogan                                                                                                                                                           |
| Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II |                        |                |                                                                                                                                                                         |
| 88.                               | KP2KP Majenang         | Majenang       | Kab. Cilacap:<br>1. Kec. Bantarsari<br>2. Kec. Cimanggu<br>3. Kec. Cipari<br>4. Kec. Dayeuhluhur<br>5. Kec. Gandrungmangu<br>6. Kec. Karangpucung<br>7. Kec. Kedungreja |



| NO.                                              | NAMA               | LOKASI       | DAERAH ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                    |              | 8. Kec. Majenang<br>9. Kec. Patimuan<br>10. Kec. Sidareja<br>11. Kec. Wanareja |
| 89.                                              | KP2KP Muntilan     | Muntilan     | Kab. Magelang                                                                  |
| 90.                                              | KP2KP Sragen       | Sragen       | Kab. Sragen                                                                    |
| 91.                                              | KP2KP Banjarnegara | Banjarnegara | Kab. Banjarnegara                                                              |
| 92.                                              | KP2KP Wonogiri     | Wonogiri     | Kab. Wonogiri                                                                  |
| 93.                                              | KP2KP Wonosobo     | Wonosobo     | Kab. Wonosobo                                                                  |
| Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II                 |                    |              |                                                                                |
| 94.                                              | KP2KP Mojosari     | Mojosari     | Kab. Mojokerto                                                                 |
| 95.                                              | KP2KP Sumenep      | Sumenep      | Kab. Sumenep                                                                   |
| 96.                                              | KP2KP Caruban      | Caruban      | Kab. Madiun                                                                    |
| 97.                                              | KP2KP Sampang      | Sampang      | Kab. Sampang                                                                   |
| 98.                                              | KP2KP Magetan      | Magetan      | Kab. Magetan                                                                   |
| 99.                                              | KP2KP Pacitan      | Pacitan      | Kab. Pacitan                                                                   |
| Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III                |                    |              |                                                                                |
| 100.                                             | KP2KP Bangil       | Bangil       | Kab. Pasuruan                                                                  |
| 101.                                             | KP2KP Kraksaan     | Kraksaan     | Kab. Probolinggo                                                               |
| 102.                                             | KP2KP Lumajang     | Lumajang     | Kab. Lumajang                                                                  |
| 103.                                             | KP2KP Trenggalek   | Trenggalek   | Kab. Trenggalek                                                                |
| 104.                                             | KP2KP Wlingi       | Wlingi       | Kab. Blitar                                                                    |
| 105.                                             | KP2KP Nganjuk      | Nganjuk      | Kab. Nganjuk                                                                   |
| 106.                                             | KP2KP Bondowoso    | Bondowoso    | Kab. Bondowoso                                                                 |
| Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat              |                    |              |                                                                                |
| 107.                                             | KP2KP Bengkayang   | Bengkayang   | Kab. Bengkayang                                                                |
| 108.                                             | KP2KP Sambas       | Sambas       | Kab. Sambas                                                                    |
| 109.                                             | KP2KP Mempawah     | Mempawah     | Kab. Mempawah                                                                  |
| 110.                                             | KP2KP Ngabang      | Ngabang      | Kab. Landak                                                                    |
| 111.                                             | KP2KP Sekadau      | Sekadau      | Kab. Sekadau                                                                   |
| 112.                                             | KP2KP Putussibau   | Putussibau   | Kab. Kapuas Hulu                                                               |
| 113.                                             | KP2KP Nangapinoh   | Nangapinoh   | Kab. Melawai                                                                   |
| Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |                    |              |                                                                                |
| 114.                                             | KP2KP Marabahan    | Marabahan    | Kab. Barito Kuala                                                              |

| NO.                                                      | NAMA                 | LOKASI         | DAERAH ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN        |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 115.                                                     | KP2KP Pelaihari      | Pelaihari      | Kab. Tanah Laut                            |
| 116.                                                     | KP2KP Martapura      | Martapura      | Kab. Banjar                                |
| 117.                                                     | KP2KP Rantau         | Rantau         | Kab. Tapin                                 |
| 118.                                                     | KP2KP Kandangan      | Kandangan      | Kab. Hulu Sungai Selatan                   |
| 119.                                                     | KP2KP Kotabaru       | Kotabaru       | Kab. Kotabaru                              |
| 120.                                                     | KP2KP Paringin       | Paringin       | Kab. Balangan                              |
| 121.                                                     | KP2KP Amuntai        | Amuntai        | Kab. Hulu Sungai Utara                     |
| 122.                                                     | KP2KP Kuala Kurun    | Kuala Kurun    | Kab. Gunung Mas                            |
| 123.                                                     | KP2KP Kuala Kapuas   | Kuala Kapuas   | Kab. Kapuas                                |
| 124.                                                     | KP2KP Pulang Pisau   | Pulang Pisau   | Kab. Pulang Pisau                          |
| 125.                                                     | KP2KP Kasongan       | Kasongan       | Kab. Katingan                              |
| 126.                                                     | KP2KP Kuala Pembuang | Kuala Pembuang | Kab. Seruyan                               |
| 127.                                                     | KP2KP Nanga Bulik    | Nanga Bulik    | Kab. Lamandau                              |
| 128.                                                     | KP2KP Sukamara       | Sukamara       | Kab. Sukamara                              |
| 129.                                                     | KP2KP Buntok         | Buntok         | Kab. Barito Selatan                        |
| 130.                                                     | KP2KP Tamiang Layang | Tamiang Layang | Kab. Barito Timur                          |
| 131.                                                     | KP2KP Puruk Cahu     | Puruk Cahu     | Kab. Murung Raya                           |
| Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur                      |                      |                |                                            |
| 132.                                                     | KP2KP Nunukan        | Nunukan        | Kab. Nunukan                               |
| 133.                                                     | KP2KP Sangatta       | Sangatta       | Kab. Kutai Timur                           |
| 134.                                                     | KP2KP Tanah Grogot   | Tanah Grogot   | Kab. Paser                                 |
| 135.                                                     | KP2KP Tanjung Selor  | Tanjung Selor  | Kab. Bulungan                              |
| 136.                                                     | KP2KP Malinau        | Malinau        | Kab. Malinau                               |
| 137.                                                     | KP2KP Sendawar       | Sendawar       | 1. Kab. Kutai Barat<br>2. Kab. Mahakam Ulu |
| Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara |                      |                |                                            |
| 138.                                                     | KP2KP Enrekang       | Enrekang       | Kab. Enrekang                              |
| 139.                                                     | KP2KP Pinrang        | Pinrang        | Kab. Pinrang                               |
| 140.                                                     | KP2KP Sidrap         | Sidrap         | Kab. Sidenreng Rappang                     |
| 141.                                                     | KP2KP Malili         | Malili         | Kab. Luwu Timur                            |
| 142.                                                     | KP2KP Masamba        | Masamba        | Kab. Luwu Utara                            |
| 143.                                                     | KP2KP Makale         | Makale         | 1. Kab. Tanatoraja<br>2. Kab. Toraja Utara |
| 144.                                                     | KP2KP Benteng        | Benteng        | Kab. Kepulauan Selayar                     |

| NO.                                                                    | NAMA               | LOKASI       | DAERAH ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 145.                                                                   | KP2KP Sinjai       | Sinjai       | Kab. Sinjai                                       |
| 146.                                                                   | KP2KP Bontosunggu  | Bontosunggu  | Kab. Jeneponto                                    |
| 147.                                                                   | KP2KP Sungguminasa | Sungguminasa | Kab. Gowa                                         |
| 148.                                                                   | KP2KP Takalar      | Takalar      | Kab. Takalar                                      |
| 149.                                                                   | KP2KP Watansoppeng | Watansoppeng | Kab. Soppeng                                      |
| 150.                                                                   | KP2KP Sengkang     | Sengkang     | Kab. Wajo                                         |
| 151.                                                                   | KP2KP Pangkajene   | Pangkajene   | Kab. Pangkajene Kepulauan                         |
| 152.                                                                   | KP2KP Unaaha       | Unaaha       | 1. Kab. Konawe<br>2. Kab. Konawe Kepulauan        |
| 153.                                                                   | KP2KP Polewali     | Polewali     | Kab. Polewali Mandar                              |
| 154.                                                                   | KP2KP Mamasa       | Mamasa       | Kab. Mamasa                                       |
| 155.                                                                   | KP2KP Pasangkayu   | Pasangkayu   | Kab. Mamuju Utara                                 |
| 156.                                                                   | KP2KP Lasusua      | Lasusua      | Kab. Kolaka Utara                                 |
| 157.                                                                   | KP2KP Rumbia       | Rumbia       | Kab. Bombana                                      |
| 158.                                                                   | KP2KP Raha         | Raha         | 1. Kab. Muna<br>2. Kab. Muna Barat                |
| Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara |                    |              |                                                   |
| 159.                                                                   | KP2KP Tomohon      | Tomohon      | Kab. Tomohon                                      |
| 160.                                                                   | KP2KP Limboto      | Limboto      | Kab. Gorontalo                                    |
| 161.                                                                   | KP2KP Marissa      | Marissa      | Kab. Pohuwatu                                     |
| 162.                                                                   | KP2KP Tilamuta     | Tilamuta     | Kab. Boalemo                                      |
| 163.                                                                   | KP2KP Tondano      | Tondano      | Kab. Minahasa                                     |
| 164.                                                                   | KP2KP Amurang      | Amurang      | Kab. Minahasa Selatan                             |
| 165.                                                                   | KP2KP Talaud       | Talaud       | Kab. Kepulauan Talaud                             |
| 166.                                                                   | KP2KP Banawa       | Banawa       | Kab. Donggala                                     |
| 167.                                                                   | KP2KP Parigi       | Parigi       | Kab. Parigi Moutong                               |
| 168.                                                                   | KP2KP Banggai      | Banggai      | 1. Kab. Banggai Kepulauan<br>2. Kab. Banggai Laut |
| 169.                                                                   | KP2KP Bungku       | Bungku       | 1. Kab. Morowali<br>2. Kab. Morowali Utara        |
| 170.                                                                   | KP2KP Buol         | Buol         | Kab. Buol                                         |
| 171.                                                                   | KP2KP Sanana       | Sanana       | 1. Kab. Kepulauan Sula<br>2. Kab. Pulau Taliabu   |
| 172.                                                                   | KP2KP Tidore       | Tidore       | Kab. Tidore Kepulauan                             |

| NO.                                 | NAMA              | LOKASI      | DAERAH ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 173.                                | KP2KP Labuha      | Labuha      | Kab. Halmahera Selatan                                                                                               |
| 174.                                | KP2KP Maba        | Maba        | Kab. Halmahera Timur                                                                                                 |
| Kantor Wilayah DJP Bali             |                   |             |                                                                                                                      |
| 175.                                | KP2KP Kerobokan   | Kerobokan   | Kec. Kuta Utara                                                                                                      |
| 176.                                | KP2KP Ubud        | Ubud        | Kab. Gianyar:<br>1. Kec. Payangan<br>2. Kec. Sukawati<br>3. Kec. Tampaksiring<br>4. Kec. Tegallalang<br>5. Kec. Ubud |
| 177.                                | KP2KP Amlapura    | Amlapura    | Kab. Karang Asem                                                                                                     |
| 178.                                | KP2KP Negara      | Negara      | Kab. Jembrana                                                                                                        |
| Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara    |                   |             |                                                                                                                      |
| 179.                                | KP2KP Dompu       | Dompu       | Kab. Dompu                                                                                                           |
| 180.                                | KP2KP Taliwang    | Taliwang    | Kab. Sumbawa Barat                                                                                                   |
| 181.                                | KP2KP Gerung      | Gerung      | Kab. Lombok Barat:<br>1. Kec. Gerung<br>2. Kec. Kuripan<br>3. Kec. Kediri<br>4. Kec. Lembar<br>5. Kec. Sekotong      |
| 182.                                | KP2KP Selong      | Selong      | Kab. Lombok Timur                                                                                                    |
| 183.                                | KP2KP Larantuka   | Larantuka   | Kab. Flores Timur                                                                                                    |
| 184.                                | KP2KP Baa         | Baa         | Kab. Rote Ndao                                                                                                       |
| 185.                                | KP2KP Soe         | Soe         | Kab. Timor Tengah Selatan                                                                                            |
| 186.                                | KP2KP Bajawa      | Bajawa      | Kab. Ngada                                                                                                           |
| 187.                                | KP2KP Labuan Bajo | Labuan Bajo | Kab. Manggarai Barat                                                                                                 |
| 188.                                | KP2KP Kalabahi    | Kalabahi    | Kab. Alor                                                                                                            |
| 189.                                | KP2KP Waikabubak  | Waikabubak  | Kab. Sumba Barat                                                                                                     |
| Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku |                   |             |                                                                                                                      |
| 190.                                | KP2KP Namlea      | Namlea      | Kab. Buru                                                                                                            |
| 191.                                | KP2KP Masohi      | Masohi      | Kab. Maluku Tengah                                                                                                   |
| 192.                                | KP2KP Piru        | Piru        | Kab. Seram Bagian Barat                                                                                              |
| 193.                                | KP2KP Bula        | Bula        | Kab. Seram Bagian Timur                                                                                              |

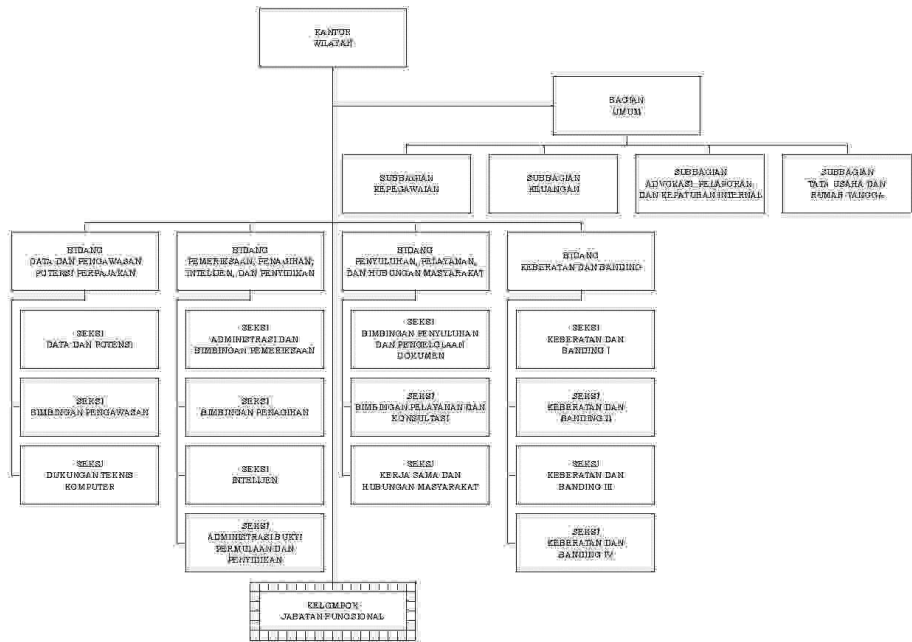
| NO.  | NAMA             | LOKASI     | DAERAH ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN     |
|------|------------------|------------|-----------------------------------------|
| 194. | KP2KP Dobo       | Dobo       | Kab. Kepulauan Aru                      |
| 195. | KP2KP Tual       | Tual       | 1. Kota Tual<br>2. Kab. Maluku Tenggara |
| 196. | KP2KP Saumlaki   | Saumlaki   | Kab. Maluku Tenggara Barat              |
| 197. | KP2KP Fakfak     | Fakfak     | Kab. Fakfak                             |
| 198. | KP2KP Teminabuan | Teminabuan | Kab. Sorong Selatan                     |
| 199. | KP2KP Kaimana    | Kaimana    | Kab. Kaimana                            |
| 200. | KP2KP Sarmi      | Sarmi      | Kab. Sarmi                              |
| 201. | KP2KP Wamena     | Wamena     | Kab. Jayawijaya                         |
| 202. | KP2KP Serui      | Serui      | Kab. Kepulauan Yapen                    |
| 203. | KP2KP Nabire     | Nabire     | 1. Kab. Waropen<br>2. Kab. Nabire       |
| 204. | KP2KP Bintuni    | Bintuni    | Kab. Teluk Bintuni                      |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

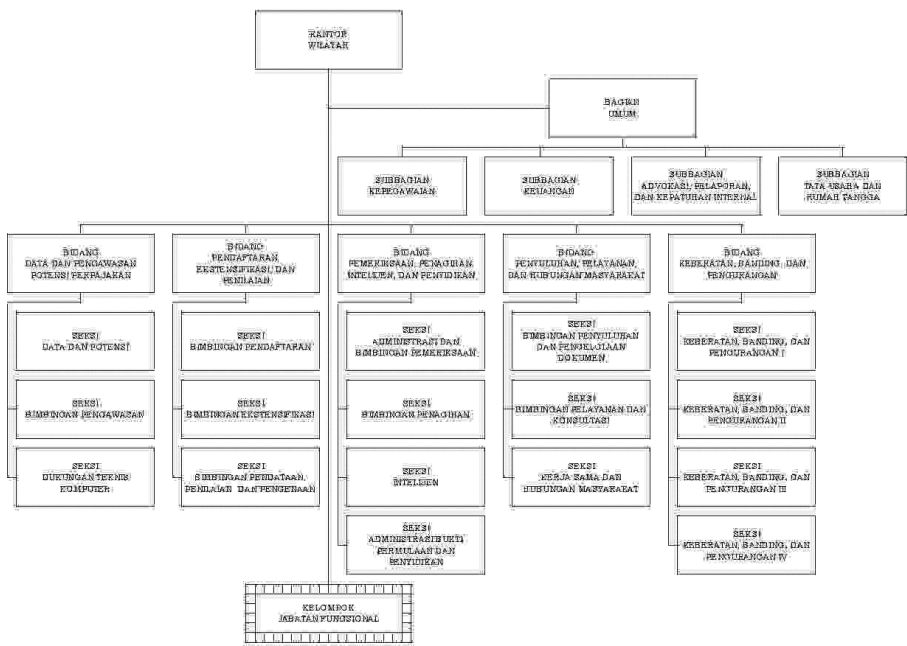
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

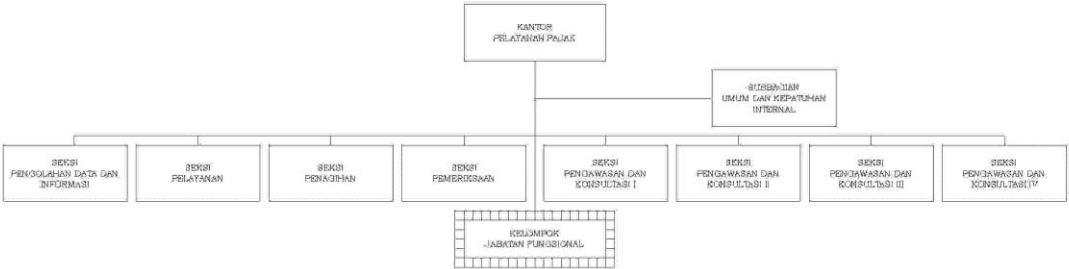
BAGAN ORGANISASI  
KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN  
KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUS



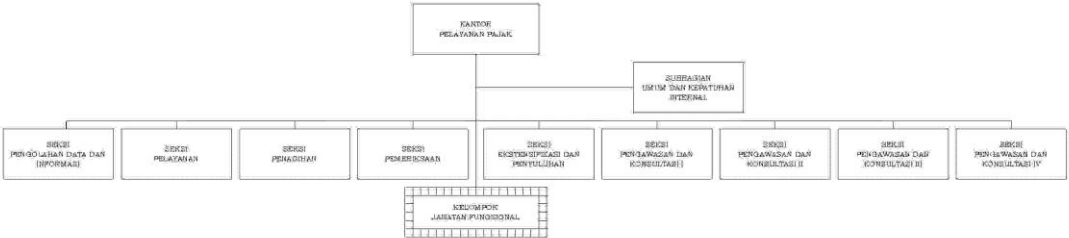
BAGAN ORGANISASI  
KANTOR WILAYAH  
SELAIN KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN  
KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUS



BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

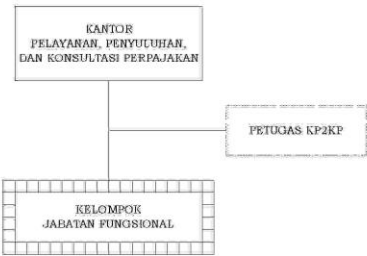


BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA





BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI